RENCANA STRATEGIS 2025-2029

SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029** ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan lima tahunan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Periode 2025–2029 merupakan fase penting dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Setelah melalui dinamika dan tantangan pada periode sebelumnya, termasuk dampak bencana alam dan pandemi, serta dinamika pemulihan ekonomi, pemerintah provinsi terus berupaya memperkuat pondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah dituntut untuk lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, serta penyusunan kebijakan strategis yang mendukung capaian pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up, dengan memperhatikan evaluasi terhadap capaian Renstra periode sebelumnya, dinamika lingkungan strategis, serta isu-isu aktual yang berkembang. Isu-isu tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, akselerasi transformasi digital pemerintahan, efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta penguatan sinergi kelembagaan dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Di sisi lain, Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak koordinasi internal pemerintahan diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas daerah seperti pengurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang merata.

Penyusunan Renstra ini juga diarahkan untuk mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Oleh karena itu, Renstra Sekretariat Daerah disusun secara fleksibel, namun tetap berorientasi pada hasil (result-based planning), dengan menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur, realistis, dan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lebih lanjut, keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kolaborasi yang erat antara seluruh bagian dan subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta koordinasi yang solid dengan seluruh perangkat daerah lainnya. Kualitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh target dan arah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan akan terus disempurnakan seiring dengan dinamika pembangunan dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen ini ke depan. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, perangkat daerah terkait, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga kerja keras dan komitmen bersama ini menjadi amal jariyah yang membawa kebaikan bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Mamuju, 17 Juli 2025

Plh. Sekretaris Daerah,
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. Herdin Ismail, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP: 197007011991011004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

LAMPIRAN-LAMPPIRAN ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **5**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 5

2.2. Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 19

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 20

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.5 Aset Sekretariat Daerah 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH **30**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 30

3.2. Telaahan Program Pembangunan Daerah 34

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **49**

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **51**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **56**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN **57**

BAB VIII PENUTUP **58**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Pendidikan ASN Lingkup Sekretariat Daerah.....	21
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	32
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah.....	50
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN-LAMPPIRAN

Lampiran I Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Lampiran II Struktur Organisasi Staf Ahli Gubernur

Lampiran III Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan adanya perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja jangka menengah. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang menggambarkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, subkegiatan serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengharuskan setiap perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sebagai landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang bertanggung jawab atas koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan pimpinan daerah, memegang peran sentral dalam memastikan tercapainya sinergi antarperangkat daerah serta konsistensi pelaksanaan program pembangunan di Sulawesi Barat.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur pembantu pimpinan kepala daerah dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi pemerintahan, administrasi umum, dan kebijakan lintas sektor, memiliki peran strategis dalam mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk komitmen untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun lima tahun ke depan, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan.

Kondisi Provinsi Sulawesi Barat saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, seperti kesenjangan wilayah, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta perlunya penguatan peran kelembagaan dalam mendukung program prioritas nasional maupun daerah. Oleh karena itu, Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah, sekaligus mengintegrasikan berbagai pendekatan pembangunan yang berbasis kinerja dan hasil.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan prioritas yang akan dilaksanakan oleh OPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Perangkat Daerah (Renstra PD).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Sekretariat Daerah menjadi acuan dalam menyusun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, hal ini untuk memastikan bahwa Program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD sehingga dapat memberikan konstribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penyusunan kegiatan juga memperhatikan kedudukan dalam urusan, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Renstra Sekretariat Daerah yang dirumuskan dapat terlaksana secara efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga secara optimal dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Pemerintah Nomir 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tetang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Renstra ini dimaksudkan :

1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Sekretariat Daerah dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan tujuan organisasi;
2. Menjadi pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menjadi instrumen untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja organisasi;
5. Menjadi bahan penyusunan perencanaan untuk tahap selanjutnya, sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2025-2029, dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
- 3.2. Telaahan Program Pembangunan Daerah
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli
    1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
    2. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
    3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasi:
    1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
    2. Biro Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasi:
    3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
    4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

c. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasi:
    1. Biro Organisasi; dan
    2. Biro Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

b. Staf Ahli

1. Staf Ahli Gubernur terdiri atas :
    a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
    b. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
    c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
2. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik, mempunyai tugas :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Memberikan pertimbangan dan saran dalam perumusan kebijakan kepada gubernur, wakil gubernur dan Sekretaris Daerah baik diminta ataupun tidak diminta sesuai dengan pembidangannya.
b. Dapat melakukan koordinasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada perangkat daerah sesuai dengan pembidangannya.

3. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas :
   a. Memberikan pertimbangan dan saran dalam perumusan kebijakan kepada gubernur, wakil gubernur dan Sekretaris Daerah baik diminta ataupun tidak diminta sesuai dengan pembidangannya.
   b. Dapat melakukan koordinasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada perangkat daerah sesuai dengan pembidangannya.
4. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :
   a. Memberikan pertimbangan dan saran dalam perumusan kebijakan kepada gubernur, wakil gubernur dan Sekretaris Daerah baik diminta ataupun tidak diminta sesuai dengan pembidangannya.
   b. Dapat melakukan koordinasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada perangkat daerah sesuai dengan pembidangannya

c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
   a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
   d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

(1) Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

(2) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
e. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait
f. pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

a. Bagian Pemerintahan; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha.

(2) Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Pemerintahan, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Biro: dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
   b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
   c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
   d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
   f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
   g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
   h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
   i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
   j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Hukum

(1) Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

(2) Biro Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
   b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
   c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Hukum, terdiri atas:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
b. Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III.

Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

(2) Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

Bagian Bantuan Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
   b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
   c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
   d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
   f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
   g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
   h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
   i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
   j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

(1) Asisten Perekonomian dan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan daerah pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
   a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
   b. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
   c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
   d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
   e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

(1) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan.

(2) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

a. Subbagan Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan system informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro;
g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
j. melaksanakan pembinaan pegawai ASN.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

(2) Dalam melaksanakan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :

a. Subbagian Administrasi dan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Administrasi dan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
d. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sectoral;
e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
g. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
h. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan renstra, renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
j. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
k. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
l. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
m. melaksanakan pembinaan pegawai ASN;
n. melaksanakan review perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Asisten Administrasi Umum

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi dan umum.

(2) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi dan umum;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Organisasi

(1) Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

(2) Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

Biro Organisasi terdiri atas :

a. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
c. Bagian Tatalaksana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(1) Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan.

Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

(2) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

(3) Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Tatalaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik;
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
   a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
   b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
   c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
   d. melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya lingkup biro;
   e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, , LKjIP, dan LKPJ lingkup biro;
   f. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
   g. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
   h. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Umum

(1) Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan.

Biro Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Biro Umum terdiri atas:

a. Bagian Rumah Tangga dan Pelayanan Umum;
b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
c. Bagian Administrasi Pimpinan.

(1) Bagian Rumah Tangga dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam.

Bagian Rumah Tangga dan Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam; dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

(2) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset, Penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat daerah.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dan verifikasi sekretariat daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset, Penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat daerah;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset, Penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat daerah; dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

(3) Bagian Administrasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, materi, komunikasi pimpinan dan protokol.

Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, materi, komunikasi pimpinan dan protokol;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan danstaf ahli, materi, komunikasi pimpinandan protokol; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh biro umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi pimpinan, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
b. Subbagian Materi, Komunikasi Pimpinan dan Protokol; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas :
   a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan tata usaha pimpinan dan staf ahli;
   b. melaksanakan pengumpulan bahan untuk pelayanan administrasi tata usaha pimpinan dan staf ahli;
   c. melaksanakan penyiapan bahan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan staf ahli gubernur;
   d. menyusun agenda dan administrasi persuratan pimpinan dan staf ahli secara elektronik;
   e. melaksanakan pengumpulan data, bahan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan pimpinan dan staf ahli;
   f. mengurus, memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban ruang kerja pimpinan dan staf ahli;
   g. melaksanakan pengumpulan bahan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan serta upacara hari besar nasional dan lainnya;
   h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
b. Subbagian Materi, Komunikasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas :
   a. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
   b. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
   c. melaksanakan monitoring, evaluasi serta penyusunan dokumentasi dan pelaporan;
   d. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
   e. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
   f. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
   g. menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur;
   h. menyusun naskah sambutan dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur;
   i. mendokumentasikan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
   j. menyusun notulensi rapat Gubernur dan Wakil Gubernur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

k. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
l. melakukan koordinasi dengan instansi yang memerlukan kegiatan keprotokolan;
m. menyusun bahan kebijakan umum hubungan keprotokolan;
n. melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan keprotokolan; dan
o. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, program kerja dan petunjuk teknis sub bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
c. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro umum;
e. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
f. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.
g. menyiapkan bahan urusan kepegawaian yang meliputi usul kepangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, kenaikan gaji berkala, pembuatan KARIS/KARSU, DUK, SKP, dan Administrasi kepegawaian lainnya lingkup biro umum;
h. Menyiapkan Bahan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analilis Beban Kerja;
i. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
j. Menyiapkan Bahan Penyusunan Dalam Pengembangan SDM Apatur;
k. mengumpul Standar Operasional Prosedur dari masing-masing bagian pada biro umum;
l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS lingkup Sekretariat Daerah hingga bulan Juli 2025 sebanyak 252 orang, terdiri dari 146 orang atau 57.94% Laki-laki dan 106 orang atau 42.06% Perempuan.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah terdiri dari jenjang S3 sebanyak 1.19 % atau 3 orang, S2 sebanyak 27.78 % atau 70 orang, S1 sebanyak 48.41 % atau 122 orang, D.3 sebanyak 4.76 % atau 12 orang, SMU sebanyak 17.06 % atau 43 orang serta SMP sebanyak 0.40 % atau 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tergolong baik.

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S1, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SD, SLTP dan SLTA).

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan ASN Lingkup Sekretariat Daerah

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan					Tingkat Pendidikan						Eselon					
		L	P	IV	III	II	I	VII (P3K)	S3	S2	S1	D3	SMU	SMP	I	II	III	IV	JF	PL/ JFU
1	Sekretaris Daerah	1		1					1						1					
2	Asisten	3		3					1	2						3				
3	Staf Ahli Gubernur	2	1	3						3						3				
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	28	13	6	32	3	-	-	-	13	20	1	7	-	-	1	1	1	14	24
5	Biro Hukum	13	20	5	22	5		1	-	10	17	1	5	-	-	1	2	1	13	17
6	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	13	16	8	15	5		1	1	11	10	2	5	-	-	1		1	9	17
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	21	18	5	31	3	-	1	-	6	30	1	2	-	-	1	1	1	26	9
8	Biro Organisasi	13	11	3	13	5	-	3	-	5	13	-	6	-	-	-	3	1	2	15
9	Biro Umum	52	27	5	54	18		2		20	32	7	18	1		1	3	3	4	66
JUMLAH		146	106	39	167	39		8	3	70	122	12	43	1	1	11	10	8	68	148

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah meliputi pelayanan di bidang; pemerintahan dan kesra, hukum, perekonomian dan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi serta administrasi, keuangan dan pelayanan umum. Gambaran pelayanan dari 6 Biro yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;

Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan. Jenis kinerja pelayana yang dilaksanakan adalah :

a. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagaimana mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

Biro Umum

Biro Umum, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. Tantangan

1) Masih terdapat kompetensi sumberdaya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
2) Perubahan pola pikir dan budaya kerja normatif aparatur pemerintah menjadi pola pikir dan budaya kerja konstruktif yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
3) Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Peluang

1) Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang cukup potensial;
2) Komitmen pimpinan cukup tinggi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

2.5 Aset Sekretariat Daerah

1. Aset Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	2	2		
Kendaraan Dinas Roda 2	16	3		
Kursi	85			
Meja	51			
Lemari	22			
AC	13	13		
Komputer	16	16		
Laptop	41	41		

2. Aset Biro Hukum

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	6	6	-	-
Kendaraan Dinas Roda 2	14	11	3	-
Kursi	146	146	-	-
Meja	45	43	-	2
Lemari	29	29	-	-
AC	10	9	-	1
Komputer	22	21	-	1
Laptop	29	22	-	7
Rak Besi	2	2	-	-
Rak Kayu	1	-	-	1
Filling Kabinet	20	19	1	-
Lemari Es (Kulkas)	2	1	1	-
Televisi	2	2	-	-
Wireles	1	1	-	-
Printer	28	26	2	-
Mesin Absen	1	1	-	-
Sofa	2	2	-	-
Kompor Gas	1	1	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabung Gas (12 Kg)	1	1	-	-
Mesin Ketik Listrik	2	2	-	-
Peralatan Komputer	6	6	-	-
Layar Infocus/Projector/LCD	4	4	-	-
UPS	1	1	-	-
Server	1	1	-	-
Modem	1	1	-	-
Hub	1	1	-	-
Kipas Angin	1	1	-	-
Scanner	7	7	-	-
Micropone Table Stand	2	2	-	-
Peralatan Studio Lainnya	15	15	-	-
Speaker Komputer (Yamaha)	4	4	-	-
Laser Pointer	1	1	-	-
Tape Recorder	2	2	-	-
Telephone Mobile (Android)	5	5	-	-
Running Tester	1	1	-	-
Alat Listrik	1	1	-	-
Router	3	3	-	-
Peralatan Jaringan Lainnya	2	2	-	-
Bangunan Gedung Lainnya	1	1	-	-

3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	4	4	1	-
Kendaraan Dinas Roda 2	8	8	-	-
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	18	-	-
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	1		
Meja Rapat	2	2	-	-
Meja Makan Besi	1	1	-	-
Meja 1/2 Biro	1	1		
Meja Tamu Biasa	1	1	-	-
Meja Panjang	1	1	-	-
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4		
Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-
Kursi Rapat LULA type 3	6	6		
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	11	11		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3		
Kursi Rapat	6	6	-	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4		
Kursi Besi /Metal	14	14		
Lemari Kayu	3	3	-	-
Lemari Besi / Metal	2	2	-	-
Lemari Arsip Dinamis	3	3	-	-
AC	9	9	-	-
Film/Projector PC	1	1	-	-
PC Unit	15	15	-	-
Laptop	12	12	-	-
Tablet Pc	1	1	-	-
filing Cabinet Besi	2	2		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Camera Elektronik	1			1
Handy Cam	1			1
Mesin Absensi	1	1		
Telephone Mobile	6	6	-	-
Scanner	4	4	-	-
Lemari Es	2	2	-	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	11		4
Personal Computer	5	4		1
Note book	2	2		
Facsimile	1	1		
Video Confernce	2	2		
loudspeaker	1	1		
Router	1	1		
Acces Point	2	2		
Sofa	1			1
Piala	1	1		
Televisi	2	2	-	-

4. Aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Mesin Diesel	1	1	-	-
Station Wagon	1	1	-	-
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	2	-	-
Sepeda Motor	6	6	-	-
Termometer Standar	1	1	-	-
Lemari Penyimpan	7	7	-	-
Mesin Fotocopy Folio	1	1	-	-
Mesin Fotocopy Folio	1	1	-	-
Lemari Besi/Metal	8	8	-	-
Rak Besi	1	1	-	-
Filling Cabinet Besi	2	2	-	-
Brandkas	2	2	-	-
Alat Kantor Lainnya Bardi Smart Door Lock	1	1	-	-
Meja Rapat	19	19	-	-
Kursi Tamu	3	3	-	-
Kursi Tamu	50	50	-	-
Sofa	1	1	-	-
Lemari Es	1	1	-	-
A.C. Split	12	12	-	-
Televisi	1	1	-	-
Wireless	3	3	-	-
Handy Came	1	1	-	-
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	26	-	-
Kursi Pejabat Eselon II	3	3	-	-
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40	40	-	-
Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2	2	-	-
Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	5	-	-
Digital Audio Taperecorder	1	1	-	-
Camera Electronic	2	2	-	-
Tripod Camera	1	1	-	-
Layar Film/Projector	1	1	-	-
LCD Monitor	1	1	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Camera Conference	1	1	-	-
Serial Scanner/Printer	2	2	-	-
P.C Unit	17	17	-	-
Lap Top	35	35	-	-
Note Book - apple /macbook air	6	6	-	-
Note Book - dell/inspiron	1	1	-	-
Note Book - azus/zenbook duo	1	1	-	-
Tablet PC	1	1	-	-
Monitor	1	1	-	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	8	-	-
Scanner (Peralatan Personal Komputer) – Epson	2	2	-	-
Peralatan Personal Komputer lainnya - magic mouse 2 maccbook	6	6	-	-
Peralatan Personal Komputer lainnya – Konektor RJ45	1	1	-	-
Server	1	1	-	-
Rak Server	1	1	-	-
Acces Point - UBIQUTY UAP	2	2	-	-
Peralatan Jaringan lainnya – CISCO GIGABIT MANAGED /switch SG350-52K9-E U	1	1	-	-
Peralatan Jaringan lainnya – FeltegKJet glass	6	6	-	-
Peralatan Jaringan lainnya - asus/zenbook duo ux481fa-bm03 6t	1	1	-	-
Peralatan Jaringan lainnya - asus/zenbook duo ux481fa-bm03 6t	1	1	-	-
alat penolong lainnya (dst) - Hartex	2	2	-	-
Closed Circuit Television (CCTV)	1	1	-	-
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	1	-	-
Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	1	-	-
Televisi Samsung 65 Inch	1	1	-	-
Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L3210	5	5	-	-
Acces Point / Router bundar Ubiqiti U6-PRO Unifi 6	3	3	-	-

5. Aset Biro Organisasi

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	3	2	1	-
Kendaraan Dinas Roda 2	9	8	1	-
Lemari kayu	1	1	-	-
Filing Kabinet	2	1	-	1
Alat Penghancur Kertas	1	-	-	1
Mesin Absensi	2	1	-	1
Meja Rapat	3	3	-	-
Meja Resepsionis	1	1	-	-
Meja 1/2 Biro	1	1	-	-
Kursi Rapat	25	25	-	-
Kursi Tamu	1	1	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Partisi	1	1	-	-
Sofa	2	1	1	-
Lemari ES	2	1	1	-
AC Split	8	6	2	-
Televisi	2	2	-	-
Sound System	1	-	1	-
Camera Video	1	-	-	1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	7	1	-
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	24	20	4	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	4	1	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	4	1	-
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	16	10	6	-
Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon II	6	4	2	-
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	1	1	-
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	6	-	-
Komputer Jaringan lainnya	1	-	-	1
P.C Unit	6	3	1	2
Lap Top	22	14	4	4
Note Book	5	2	2	1
Printer	14	8	3	3
Scanner	1	1	-	-
Router	1	1	-	-
Acces Point	3	3	-	-
Lasyar Film/Proyektor	1	1	-	-
Camera Conference	1	1	-	-
Telephone Mobile	3	2	1	-

6. Aset Biro Umum

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	144	92	16	19
Kendaraan Dinas Roda 3	6	3	1	2
Kendaraan Dinas Roda 2	136	61	35	40
Jet Sky	1	1	-	
Air Conditioner	253	100	62	91
Alat Pemadam Kebakaran	95	-	-	95
Mesin Penghancur Kertas	28	8	14	6
Brandkas	6	2	-	4
Camera	68	20	12	36
Coffee Maker	10	1	1	8
Dispenser	56	21	8	27
Drone	1	1		
Treadmil	4	2	1	4
Exhause Fan	7	3	-	4
Facsimile	4	-	-	4
Filing Cabinet Besi	28	12	-	16
Genset	11	5	-	6
Handy Talky (HT)	128	33	35	60
Hard Disk	8	4	-	4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Handphone	34	30	4	-
Jam Ukir Jepara	10	3	2	5
Karpet	101	64	-	37
Ketam Listrik	2	-	1	1
Kipas Angin	18	4	4	10
Kitchen Set	10	5	-	5
Kompor Gas	27	9	2	16
Kompor Listrik	9	3	1	5
Komputer / P.C	53	40	3	10
Lemari Es	71	33	15	23
Showcase	12	5	1	6
Kursi Kerja	947	285	399	263
Kursi Rapat	1332	1213	57	62
Kursi Tunggu	281	15		266
Laptop/notebook	235	77	72	86
Lemari kayu Arsip	39	15	4	20
Lemari kaca	10	4	-	6
Lemari Pakaian	20	9	1	10
Lensa Kamera	16	6	-	10
Meja Kerja	454	264	25	165
Meja Makan	22	9	3	10
Meja Rapat	37	19	4	14
Meja Tamu	18	12	2	4
Mesin Absensi	8	4	-	4
Mesin Bor	14	2	5	7
Mesin Cuci	13	5	2	6
Mesin Fotocopy	13	1	4	8
Mesin Gergaji	3	1	1	1
Mesin ketik listrik	10	-	-	10
Mesin Ketik Manual	13	-	-	13
Mesin Kompresor	2	1	-	1
Mesin Las listrik	5	1	-	4
Mesin Pemotong Rumput	9	2	1	6
Mesin Penghisap Debu	6	2	2	2
Microphone	38	12	5	21
Mixer Sound	18	9	2	7
Orgen/Electrone	2	1		1
Oven Listrik	4	2	-	2
Pompa Air	7	4	1	2
Printer	188	32	27	129
Rice Cooker (Alat Dapur)	5	3	-	2
Router	15	8	-	7
Scanner	22	10	3	9
Sound	168	15	6	147
Sofa	273	246	10	17
Tabung Gas	9	9	-	-
Tangga Aluminium	6	2	1	3
Tangga Hidrolik	1	1	1	-
Televisi	115	47	26	42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tempat Tidur	115	70	18	27
Tenda	82	53	17	12
Uninterruptible Power Supply (UPS)	24	10	2	12
Video Trone	3	3	-	-
Video Conference	2	2	-	-
Wireless	23	12	3	8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Pada tataran Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan lingkup Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai.

Selain permasalahan umum di atas, terdapat 2 (dua) factor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara optimal berdasarkan analisis beban kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja organisasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja pada setiap unit belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Kurangnya sinergitas dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat dinamis mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap penyusunan LPPD
		Rendahnya komitmen dan respon perangkat daerah terhadap LPPD
		Kurangnya pemahaman, responsivitas dan komitmen terhadap SPM
		Rendahnya responsivitas terhadap penataan batas wilayah dan Kerjasama daerah
		Koordinasi terhadap penataan batas wilayah dan kerjasama daerah belum optimal
		Koordinasi penyusunan LKPJ dan Memori Jabatan belum optimal
		Koordinasi dan responsivitas terhadap Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat masih rendah
	Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	Rendahnya pemahaman mekanisme dan prosedur pengelolaan bantuan dan hibah
		Koordinasi dan responsivitas terhadap kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar belum optimal
		Sinkronisasi antara kebijakan provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan isu-isu kesra belum optimal
Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang tidak berjalan sesuaui jadwal	Lemahnya perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi penyusunan Propemperda
	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal	Standar operasional prosedur penyusunan produk hukum daerah yang belum berjalan secara optimal
		Belum adanya ASN yang memenuhi standarisasi dan bersertifikasi sebagai perancang peraturan perundang-undangan
		Masih terdapat regulasi yang tidak sinkron
		Kurangnya koordinasi dalam proses fasilitasi dan evaluasi produk hukum dengan bagian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		hukum kabupaten
	Fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum yang belum maksimal	Kurangnya koordinasi dan standar layanan dalam pelayanan penanganan bantuan hukum belum tersedia
		Belum adanya ASN Biro Hukum yang dapat mewakili pemerintah daerah dalam beracara dilembaga peradilan
Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Sistem informasi pembinaan perekonomian belum optimal	Belum tersedianya penyusunan perencanan sistem informasi pembinaan perekonomian
		Kurangnya fasilitasi dan kerjasama antar lembaga terkait
		Rendahnya kualitas SDM pengelola BUMD dan BLUD
	Perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan belum maksimal	Kurang efektifnya implementasi sistem pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah
		Lemahnya koordinasi dan penguatan integrasi sistem penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah
Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa	Proses pengadaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa belum optimal	Pola koordinasi dan implementasi standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa secara eletronik belum optimal
		Lemahnya konsolidasi perencanaan pengadaan barang dan jasa
	Proses pengadaan dan pelayanan jasa secara eletronik belum optimal	Minimnya sarana dan prasarana penunjang LPSE
		Belum tersusunnya e-katalog lokal
	Kapasitas SDM, pelaksanaan fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa belum memadai	Kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana pendukung layanan secara eletronik masih terbatas
		Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Capaian 8 (delapan) area perubahan yang masih rendah	Rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dan SAKIP
		Belum optimalnya penataan dan penguatan kelembagaan
		Penataan ketatalaksanaan (peta proses bisnis) belum dikelola dengan baik
		Penguatan dan pengukuran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Standar Operasional Prosedur (monitoring dan evaluasi) berbasis jenis layanan yang belum ditetapkan
		Belum efektifnya agen perubahan dan belum terbangunnya budaya kerja
		Rendahnya manajemen kinerja SDM, koordinasi pelaksanaan assessment centre dan penilaian displin pegawai
	Rendahya akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	Masih rendahnya perencanaan kinerja dan penerapan manajemen kinerja berbasis eletronik
		Belum adanya penerapan reward dan punishment secara ketat
		Kurangnya monitoring dan evaluasi pelayanan publik
Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan administrasi pimpinan serta fasilitasi perangkat daerah	Pelaksanaan pelayanan kerumahtanggan belum optimal	Penerapan standar operasional prosedur pada pelayanan kerumahtanggaan belum optimal
		Rendahnya kompetensi teknis dalam pelayanan kerumahtanggaan
		Kurangnya sarana dan prasarana kerumahtanggaan
		Belum optimalnya koordinasi dalam pemberian layanan kerumahtanggaan
		Belum diterapkannya sistem informasi pelayanan umum internal yang terstandar
	Pengelolaan keuangan lingkup sekretariat yang belum maksimal	SOP pengelolaan keuangan belum optimal
		Penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan belum maksimal
		Proses pengelolaan keuangan masih kurang efektif dan efisien
	Belum optimalnya Pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat	Perencanaan kebutuhan barang belum dikelola sesuai kebutuhan dan mempetimbangkan skala prioritas yang actual
		Penerapan Standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah yang belum optimal
		Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah lingkup Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Daerah
	Belum optimalnya pelayanan administrasi pimpinan dan perangkat daerah	Belum tersedianya standar pelayanan administrasi pimpinan yang baku dan terukur
		Belum tersedianya digitalisasi pengelolaan administrasi pimpinan dan perkantoran yang memadai dan terintegrasi
	Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan	Pelaksanaan penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan belum terlaksana dengan standar operasional yang baik
		Masih kurangnya kapasitas SDM penyiapan materi pimpinan dan keprotokoleran

3.2. Telaahan Program Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sulawesi Barat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat.

Pada tataran Sekretariat Daerah hasil telaahan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlu sinkronisasi penyusunan perencanaan lingkup Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.
2. Perlunya efektifitas tatakelola keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Perlu mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Perlu mengoptimalkan manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Perlu mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Perlu mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum Optimalnya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam upaya fisilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintah, koordinasi menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi. Kemampuan SDM dalam melakukan diplomasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. Sebab dalam upaya fasilitasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ini, benturan kepentingan seringkali tidak dapat terhindarkan sehingga upaya untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak harus bisa terwujud.

Upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melibatkan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementrian Dalam Negeri serta masingmasing kabupaten/kota serta kecamatan yang berbatasan baik dalam lingkup batas antarprovinsi maupun batas daerah di dalam wilayah Sulawesi Barat.

Kemunculan klaim atas wilayah Sulawesi Barat harus terus diantisipasi dengan kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia maupun kelengkapan data dan dokumen yang bisa menjadi kekuatan hukum dalam mengklaim wilayah khususnya wilayah terluar Sulawesi Barat.

Penegasan batas wilayah didaerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat diantaranya batas dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan batas dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 P/HUM/2023 atas Permendagri 60 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Inventarisasi data lapangan dan dokumen terkait batas daerah mutlak diperlukan serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk merumuskan kesepakatan batas daerah.

2. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama daerah.

Peran fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu peran penting yang banyak mendukung dalam pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Barat. Namun peran fasilitasi ini seringkali tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat kurangnya perhatian instansi terkait atas kebutuhan data serta kelengkapan laporan tindak lanjut atas kerjasama yang dilakukan.

Secara hukum daya ikat untuk meminta instansi yang telah difasilitasi kerjasamanya untuk melaporkan tindaklanjut kerjasama masih lemah. Meskipun telah terbit Permendagri 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Permendagri 25 tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri, namun belum ada perda yang secara khusus mengikat di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.

Padahal laporan atas tindak lanjut fasilitasi kerjasama ini menjadi hal yang dinilai oleh pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah. Untuk itu dukungan untuk mengoptimalkan fasilitasi kerjasama daerah ini perlu untuk dikuatkan

3. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (ELPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atas amanat yang diterima melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Penyusunan LPPD sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang Undang 23 tahun 2014 menjadi laporan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan desentralisasi/ urusan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah. Sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan dokumen penting yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disetiap tahunnya. Peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Barat serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di tingkat Kabupaten se Sulawesi Barat.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) , Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), upaya koordinasi untuk memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring bisa berjalan dengan baik. Selain itu komitmen pimpinan dalam hal ini, Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah adalah hal yang sangat dominan untuk memudahkan upaya koordinasi dan memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Dalam proses ini, pemahaman aparatur baik di internal selaku pendukung dalam proses pembinaan dan monitoring maupun pemahaman aparatur di masing-masing perangkat daerah yang sangat penting untuk diperhatikan sebab ketersediaan dan pemahaman atas data yang dibutuhkan dalam menyusun LPPD ini berpengaruh secara langsung dalam upaya peningkatan poin LPPD atas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

4. Belum Optimalnya Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Pembentukan daerah otonomi baru menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya sebab aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonomi baru terus disuarakan. Namun upaya fasilitasi ini belum dapat dilakukan dengan maksimal sebab moratorium pemekaran daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 masih belum dicabut.

Di sisi lain fasilitasi pembentukan daerah otonomi baru tetap harus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen terkait pembentukan daerah otonomi baru yang urgent untuk segera ditindaklanjuti sudah siap saat moratorium dicabut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan kota Mamaju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Maka upaya antisipasi atas pencabutan moratorium harus terus dilakukan dengan memastikan kelengkapan data dan ketersediaan data serta dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang dibutuhkan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyukseskan upaya pembentukan Kota Mamuju.

5. Belum optimalnya fasilitasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan DPRD

   Isu strategis terkait fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD harus menjadi salah satu isu utama pada 2025-2029 sebab Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan berdampak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan berpengaruh pula pada akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah dimana jarak antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi berjarak minimal 2 tahun sampai 2,5 tahun sehingga proses fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan proses pemilihan hingga pengambilan sumpah jabatan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini termasuk pula seluruh kelengkapan administrasi yang disyaratkan untuk penetapan pejabat yang ditunjuk. Untuk mengantisipasi hal ini, maka segala sumber daya yang dibutuhkan harus sudah siap saat pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan.

6. Belum optimalnya implementasi peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

   Gubernur selaku pimpinan di lingkup pemerintah Provinsi telah diamanatkan untuk melaksanakan sejumlah peran yang sebelumnya dilaksanakan penuh oleh pemerintah pusat. Gubernur mengemban 46 jenis tugas dan wewenang dalam perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dari sejumlah peran tersebut, setiap tahunnya ada penguatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong efektivitas pelaksanaan peran tersebut. Namun dalam prosesnya masih terdapat sejumlah tantangan yang membuat peran ini masih belum bisa diterapkan dengan optimal. Sejumlah wewenang yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke Gubernur masih belum dipahami oleh pemerintah kabupaten dan instansi vertikal.

7. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan.

   Fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam membangun harmoni sosial, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, serta memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat. Namun, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga keagamaan, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap program-program yang telah dijalankan. Kondisi ini menyebabkan dampak dari kegiatan keagamaan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

   Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pembinaan keagamaan juga menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansi keagamaan serta penguatan kapasitas kelembagaan umat. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas program-program yang bertujuan untuk mendorong moderasi beragama dan meningkatkan toleransi antar umat beragama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk itu, diperlukan strategi penguatan peran Bagian Kesra dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan secara lebih terencana, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Sinergi dengan tokoh agama, organisasi keagamaan, dan perangkat daerah lain perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem pembinaan keagamaan yang lebih inklusif dan berdampak nyata.

Salah satu kendala yang cukup terasa di lapangan adalah keterbatasan sumber daya serta lokasi rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut. Sejumlah rumah ibadah yang terletak di pelosok belum memiliki akses media komunikasi dan transportasi yang terbatas. Hambatan eksternal ini berbenturan langsung dengan hambatan internal terkait terbatasnya sumber daya baik transportasi maupun komunikasi yang mendukung mobilitas tim evaluasi dan monitoring di lapangan.

Pelaksanaan MTQ dan STQH perlu menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung pada pandangan publik pada Pemerintah Sulawesi Barat. Keikutsertaan pada ajang MTQ dan STQH saja tidak akan bisa menaikkan citra positif masyarakat atas kemampuan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan di bidang Keagamaan. Upaya untuk meraih posisi pemenang di kompetisi tersebut juga perlu menjadi perhatian yang berarti upaya koordinasi dan pembinaan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik

8. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

   Koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, baik yang bersifat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, maupun non pelayanan dasar seperti pemberdayaan sosial dan keagamaan, masih belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari tumpang tindih program antar perangkat daerah, kurang sinkronnya data dan perencanaan, serta lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu. Akibatnya, pelaksanaan program sering tidak tepat sasaran dan berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan publik di sektor kesejahteraan.

   Minimnya forum koordinasi lintas sektor dan lemahnya integrasi antar kebijakan menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Beberapa inisiatif strategis dari perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat, sehingga potensi duplikasi anggaran dan inefisiensi sumber daya menjadi isu yang berulang. Hal ini juga memperlambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

   Oleh karena itu, perlu penguatan peran koordinator pada level Bagian Kesra untuk mendorong harmonisasi kebijakan, memperkuat komunikasi antar stakeholder, serta memastikan bahwa seluruh program kesejahteraan rakyat berjalan secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Pendekatan berbasis data dan evaluasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan berkelanjutan.

   Pemahaman atas peran pemerintah provinsi khususnya Sekretariat Daerah dalam fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar masih rendah. Hal ini menghambat proses koordinasi dalam upaya fasilitasi yang dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Di sisi lain, peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terkait non pelayanan dasar di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, trasnmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan masih belum sepenuhnya dipahami oleh instansi teknis serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelibatan secara aktif oleh instansi teknis dalam upaya perumusan kebijakan di bidang tersebut pelu dilakukan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.

   Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah belum terbangunnya sinergi yang kuat antar instansi pemerintah. Komunikasi dan koordinasi yang lemah sering kali mengakibatkan ketidakharmonisan dalam merumuskan dan menyelaraskan kebijakan hukum yang akan diterbitkan.

   Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang perancangan peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor penting. Daerah atau unit kerja yang belum memiliki tenaga perancang peraturan, sehingga penyusunan regulasi tidak didasarkan pada standar kualitas yang memadai, serta kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap para perancang. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam mendukung kegiatan koordinasi, harmonisasi, serta pembahasan lintas sektor.

2. Belum optimalnya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota.

   Pembinaan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan rancangan peraturan kabupaten oleh Gubernur, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi peraturan perundang-undangan sangat urgen. Disatu sisi produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun disisi yang lain pemerintah provinsi juga melakukan fasilitasi terhadap produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota.

   Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi provinsi terhadap kabupaten dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi menjadi tantangan tersendiri yang menyebabkan upaya pembenahan regulasi terkesan lambat.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum.

   Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang ditujukan kepada kepala daerah, perangkat daerah, dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perorangan. Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, namun dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan pananganan dan penyelesaian secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di badan peradilan.

Dalam rangka penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sebagai standarisasi metode penyelesaian permasalahan litigasi dan non litigasi, sementara itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Proinsi Sulawesi Barat, bahwa dalam penanganan perkara pemerintah daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

c. Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Sistem Informasi Pembinaan Perekonomian Belum Optimal

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Peningkatan fasilitasi kebijakan perekonomian tidak hanya terfokus pada pengendalian inflasi, juga diharapkan adanya peningkatan Pendapatan Daerah melalui fasilitasi Akses Keuangan Daerah yang dapat menjembatani masyarakat pengusaha mendapatkan dukungan keuangan dari Lembaga-lembaga jasa keuangan dalam menjalankan usahanya. Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menciptakan sinergitas antara pelaku usaha dan instansi terkait diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan prima bagi setiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masyarakatkhususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah serta untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukupuntuk meningkatkan produktifitas dan akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat

Di samping itu juga pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD juga perlu peningkatan dalam hal peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Penyelenggaraan fasilitasi kebijakan perekonomian khususnya dalam fasilitasi TPID, TPAKD, BUMD dan BLUD diperlukan penguatan-penguatan terhadap beberapa hal yang merupakan akar permasalahan dari hal tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Belum tersedianya penyusunan perencanaan sistem informasi pembinaan perekonomian.
   Untuk penangan akar masalah ini, diperlukan adanya suatu perencanaan system pembinaan perekonomian yang disusun dan diinformasikan kepada seluruh stakeholder, agar dalam penyelenggaraan fasilitasi pengendalian Inflasi Daerah, fasilitasi akses keuangan daerah bagi masyarakat pengusaha kepada Lembaga-lembaga jasa keuangan dapat lebih memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah
b. Kurangnya fasilitasi dan kerjasama antar Lembaga terkait
   Fasilitasi dan kerja sama yang selama ini dibangun dengan pihak Bank Indonesia dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu lebih ditingkatkan dan juga perlu lebih melibatkan stakeholder terkait lainnya, baik itu dari Lembaga/instansi keuangan lainnya, perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten serta masyarakat-masyarakat pengusaha mikro maupun makro.
c. Rendahnya kualitas SDM pembina dan pengelola BUMD dan BLUD

   Pembinaan BUMD dan BLUD merupakan babak baru dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, hal ini diperlukan penguatan dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pembina BUMD dan BLUD. Kemudian dalam mendukung pencapaian peningkatan Pendapatan Daerah perlu adanya peningkatan Kapasitas terhadap SDM Pengelola BUMD dan BLUD mulai dari system perekrutan sampai dengan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Perumusan Kebijakan, Pengendalian dan Pengawasan Administrasi Pembangunan Daerah Belum Maksimal

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) membutuhkan suatu sistem yang dapat teringtegrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

langsung kepada setiap SKPD dan Kabupaten yang ada sehingga proses pengawasan realiasasi penyerapan anggaran dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk melihat perkembangan dalam penyerapan anggaran dalam pengambilan kebijakan efisien.

TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran, sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Adapun akar masalah dari tidak maksimalnya perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan administrasi pembangunan antara lain :

a) Kurang efektifnya implementasi sistem pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.

   Dalam akar masalah ini pelaksanaan penggunaan system pengendalian pembangunan daerah belum efektif diimplemantasikan pada masing-masing Perangkat Daerah baiktu di Provinsi maupun Kabupaten, untuk itu diperlukan penguatan-penguatan dalam mengawal implemantasi penggunaan aplikasi ini.

b) Lemahnya koordinasi dan penguatan integrasi sistem penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah.

   Memasui era digitalisasi dan seiring perkembangan teknologi, banyaknya Terobosan-terobosan baru dalam mendukung percepatan administrasi embangunan daerah salah satunya dapat dilihat dengan beraneka ragamnya aplikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan, hal ini juga perlu monitoring dan kontrol terhadap adopsi penggunaan aplikasi sehingga tidak terjadinya penggunaan aplikasi yang banyak namun dengan fungsi yang hamper sama.

   Monitoring dimaksudkan agar aplikasi yang digunakan dalam pengawasan pembangunan daerah baik itu aplikasi perencanaan, aplikasi pengelolaan keuangan maupun aplikasi pelaporan dapat terintegrasi satu sama lain dan tidak terdapat lagi penggunaan aplikasi berbeda dengan memiliki fungsi yang hampir sama.

d. Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa

   Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

   1. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa

      Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat maupun daerah terus menyiapkan regulasi yang dianggap dapan mendukung percepatan proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bukan hanya itu, pengembangan system SPSE juga terus diselaraskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kendati demikian, nampaknya percepatan proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lambatnya proses perencanaan, ketidak cakapan pelaku pengadaan dan faktor-faktor lain menjadi penyebab keterlambatan. Akibatnya sering ditemui masalah dalam hal realisasi dan pembayaran pekerjaan.

Hal ini menjadi sangat penting untul mendapat perhatian serius. Kolaborasi kerja antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan semua stake holders harus semakin ditingkatkan. Demikian pula dengan kegiatan monitoring pimpinan yang efektif sangat dibutuhkan.

2. Belum Optimalnya Kapasitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa

   Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat menentukan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mulai dari proses perencanaan dampai dengan selesainya pekerajaan. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas SDM perlu mendapat perhatian yang serius.

   Saat ini Biro Pengadaan Barang dan jasa memiliki 23 orang dari kebutuhan 44 orang dengan persentase 52,27% pada formasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (kurang dari target 60%). Selain itu juga belum memiliki personil perencana, pengelola kontrak dan pengelola swakelola. Belum lagi kebutuhan personil dalam bidang kelembagaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

   Selain itu, kebutuhan SDM eksternal Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga perlu mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya ketersediaan SDM pelaku pengadaan pada setiap perangkat daerah dan pembinaan penyedia sebagai mitra.

   Semua ini perlu dikolaborasikan agar efektifitas proses pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan.

3. Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa

   Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak hanya berfokus pada proses pemilihan penyedia barang jasa saja. Pada sisi lain, aspek lain seperti kelembagaan dan advokasi juga menjadi prioritas utama. Inilah ruh dari transformasi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

   Pada sisi kelembagaan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dituntut untuk menjadi Lembaga dengan manajemen yang baik. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan standarisasi dan pola kerja yang standar. Demikian pula dalam menjalankan fungsi koordinator UKPBJ kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

   Pada Aspek Advokasi, keberadaan UKPBJ dituntut untuk selalu memberi pendampingan. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi yang berkesinambungan menjadi sangat penting. Demikian pula kegiatan upgrading pengetahuan melalui diklat, sertifikasi dan sosialisasi.

4. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara eletronik

   Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pengadaan yang sudah ada. Pengelolaan perangkat yang baik akan sangat menentukan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, LPSE memegang peranan yang sangat penting.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pertama, pemenuhan SDM pengelolaan LPSE. Dibutuhkan ketersediaan SDM yang professional untuk mengelola bagian-bagian seperti admin. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Selain itu, bertambahnya aplikasi dan perubahan domain seperti SPSE dan INAPROC sangat membutuhkan pengelola yang handal demi mewujudkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

Kedua, pemenuhan sarana-prasarana. LPSE dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pendampingan memerlukan adanya sarana yang memadai. Terutama dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Ketiga, adalah pengeloaan informasi yang efektif. Hal ini dapat diwujudkan bila ada koordinasi yang baik dengan pihak lain, terutama yang membidangi keuangan dan perencanaan. Selain itu keberadaan aplikasi lokal penunjang yang baik akan sangat mendukung kinerja LPSE.

e. Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

   Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

   Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi peningkatan pelayanan publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/ prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

4. Belum optimalnya penataan dan fasilitasi kelembagaan pemerintah daerah

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-egineering*) yang “ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

f. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, administrasi pimpinan serta fasilitasi perangkat daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya kapasitas SDM baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun pemerataan distribusi, berdampak pada lambatnya penyelesaian dokumen kebijakan, peraturan, dan administrasi pemerintahan, kurangnya responsivitas terhadap dinamika tugas-tugas koordinatif dan pelayanan publik, serta tidak optimalnya pemanfaatan teknologi dan sistem digital pemerintahan (SPBE).

Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis dan fungsional yang berkelanjutan; Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi; Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi (merit system belum maksimal); Kesenjangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kemampuan SDM antarunit; Kurangnya regenerasi aparatur muda pada jabatan strategis.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui pelatihan berjenjang dan sertifikasi kompetensi; Mengembangkan manajemen talenta dan penataan SDM berbasis merit system; Mendorong digitalisasi kerja dan pemanfaatan teknologi untuk menutup celah keterbatasan SDM; Pemenuhan kebutuhan SDM prioritas melalui rekrutmen, redistribusi, dan promosi jabatan sesuai kebutuhan biro.

Sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan strategi pemecahan masalah-masalah tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Menyusun rencana kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Daerah secara sistematis; Optimalisasi pemanfaatan Balai Diklat, BPSDM, dan lembaga pelatihan mitra; Penerapan sistem evaluasi kinerja pegawai berbasis output dan outcome; Penyediaan platform belajar mandiri berbasis digital (learning management system); Penguatan kolaborasi antarbiro untuk efisiensi SDM lintas fungsi

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah (BMD) masih menghadapi berbagai kendala, seperti Banyak aset belum tercatat dengan baik atau tidak sesuai kondisi riil; Belum adanya sistem digital inventarisasi yang andal dan terkini; Penataan dan pemanfaatan aset belum optimal, termasuk kendaraan dinas, peralatan kantor, dan barang persediaan.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya SDM yang khusus menangani aset secara profesional dan bersertifikasi; Belum maksimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah; Lemahnya koordinasi antara pengguna dan pengelola aset; Ketidakteraturan dalam pencatatan mutasi, penghapusan dan pengamanan aset.

Persoalan tersebut dapat berdampak pada adanya potensi kehilangan aset daerah dan pemborosan anggaran; Lemahnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah; Terhambatnya pelayanan administrasi dan operasional akibat distribusi aset yang tidak efisien.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya-upaya seperti Digitalisasi penuh manajemen aset melalui sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi; Penugasan unit kerja khusus pengelolaan aset dengan SDM kompeten; Inventarisasi dan penertiban aset secara berkala dan terjadwal; Penyesuaian penggunaan aset dengan kebutuhan aktual unit kerja.

Sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan strategi pemecahan masalah-masalah tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai Penguatan tata kelola aset berbasis peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas; Peningkatan kapasitas teknis aparatur pengelola aset melalui pelatihan dan sertifikasi; Penyusunan rencana kebutuhan dan pemanfaatan aset lima tahunan; Implementasi audit internal berkala atas aset dan barang milik daerah; Pengembangan dashboard monitoring aset yang mudah diakses oleh pimpinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah milik daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebgai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan prinsip *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan barang milik daerah.

Sistem pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mencakup pengelolaan barang milik daerah tetapi juga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan sebagai pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sampai pada proses penghapusan yang dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

Barang milik daerah sekretariat daerah yang penatausahaannya berada pada Biro Umum mempunyai beberapa tantangan kedepannya diantaranya tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sedangkan kebutuhan anggaran yang kurang memadai, barang milik daerah yang masih dikuasai pihak lain atau sudah tidak diketahui keberadaannya, pencatatan dan kodefikasi barang milik daerah belum optimal serta barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain itu juga penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal.

Dalam pencatatan dan kodefikas barang milik daerah juga msih perlu di optimalkan mengingat keadaan pasca bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan beberapa barang milik daerah harus dilakukan penghapusan dan pencatatan ulang.

3. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pimpinan dan perkantoran.

Pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan merupakan ujung tombak pelayanan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pimpinan atau pejabat pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pengelolaan administrasi tidak dilakukan dengan baik pula.

Salah satu aspek yang sangat mendukung kinerja urusan pemerintahan yaitu dengan adanya pengelolaan administrasi pimpinan yang meliputi pelayanan persuratan, pengarsipan dokumen, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta pelayanan keprotokolan.

Pengelolaan administrasi pimpinan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan pimpinan sebagai pejabat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* dapat dilihat dari tata kelola administrasi yang baik serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengelolaan administrasi pemerintahan terlebih pada pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan.

Pengelolaan administrasi pada pemerintahan daerah yang mutakhir menuju percepatan pembangunan yang maju dan bersaing sudah selayaknya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi infomasi berbasis digital dan sistem daring. Dengan demikian, pelayanan pimpinan yang membutuhkan fasilitasi tata kelola administrasi baik pada aspek administrasi persuratan dan pengarsipan, penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi, pelaksanaan acara dan keprotokoleran dapat dilakukan dengan cepat dengan sistem yang terintegrasi

Biro Umum Sekretariat Daerah menjalankan fungsi utama yaitu pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

4. Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan

Fasilitasi materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian mengingat tertib dan lancarnya kegaitan pimpinan ditentuntakan pengaturan acaara dan penyiapan materi serta komunikasi antar penyelenggaran kegiatan.

Perlunya peningkatan keterampilan dasar sangat diperlukan dikarenakan sumberdaya yang ada masih kurang memahami terkait keprotokoleran. Pelatihan terkait penyiapan materi pinpinan juga perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas materi pimpinan serta kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pendampingan pimpinan masih kurang efektif. Selain itu belum adanya ASN yang berertifikasi dan memenuhi standar menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator dan target kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target KinerjaTujuan/Sasaran pada tahun ke-						
				Baseline (2024)	Perkiraan (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**74.3**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
		Meningkatnya Layanan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.39	2.60	2.69	2.87	2.97	3.21	3.45
			Tingkat layanan kesejahteraan Rakyat	99.79	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum dan Bantuan Hukum	Indeks Reformasi Hukum	97.04	97.5	97.75	98	98.15	98.3	98.5
			Indeks Kualitas	27.52	50	55	57	60	65	70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Kebijakan							
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	77.78	80	82	84	86	88	90
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Tingkat Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	94.72	94.72	95	95	95.3	95.5	95.65
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Kelembagaan yang Efektif	Indeks Kematangan Organisasi	36.88	38	40	42	44	46	48
		Meningkatnya Tata Kelola Layanan Kerumahtanggaan, Keuangan, Aset dan Administrasi Pimpinan	Tingkat Kepuasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah terhadap Pelayanan Biro Umum	98	100	100	100	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien			
	Meningkatnya Layanan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penguatan koordinasi lintas wilayah dan instansi teknis dalam percepatan penegasan batas wilayah	Fasilitasi penyusunan dokumen kerja sama daerah (MoU, PKS) yang sesuai ketentuan
			Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama daerah.
		Penguatan koordinasi lintas wilayah dan instansi teknis dalam percepatan penegasan batas wilayah	Penyusunan peta batas berbasis geospasial terkini dan pelibatan Kementerian Dalam Negeri.
			Pembentukan tim koordinasi penanganan batas wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan
		Penyempurnaan mekanisme pelaporan kinerja daerah berbasis data dan sistem elektronik.	Penguatan kapasitas tim penyusun laporan LPPD, LKPJ, dan SPM
		Penguatan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pusat di daerah	Sinkronisasi program pusat-daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat provinsi
			Optimalisasi pelaporan kewilayahan yang mencerminkan fungsi gubernur sebagai wakil pusat
		Peningkatan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung kerukunan umat beragama dan kegiatan keagamaan	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan strategis secara rutin dan terkoordinasi.
			Penguatan pembinaan ormas keagamaan dan forum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			kerukunan umat beragama (FKUB)
		Penguatan fungsi koordinasi lintas OPD dalam penanganan isu pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Penyelenggaraan forum koordinasi berkala lintas sektor bidang kesra.
			Integrasi data kesejahteraan rakyat dan percepatan penanganan isu strategis daerah
	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum dan Bantuan Hukum	Penguatan layanan harmonisasi produk hukum dan bantuan hukum	Peningkatan kapasitas aparatur di bidang legislasi dan bantuan hukum.
		Percepatan penyusunan regulasi daerah secara partisipatif dan terencana	Optimalisasi koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyusunan regulasi
		Penguatan peran koordinatif dalam harmonisasi, legal drafting, dan konsultasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Penyediaan layanan pendampingan penyusunan regulasi secara teknis dan berjenjang
			Pengembangan SOP penyusunan regulasi
		Penguatan layanan dokumentasi dan informasi hukum	Optimalisasi sistem jaringan dokumentaisi dan informasi hukum
		Meningkatkan mekanisme pengawasan dan asistensi terhadap regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Pemberian bimbingan teknis dan forum diskusi hukum antar kabupaten/kota
			Penguatan fungsi pembinaan hukum oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
		Peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, bagi pemerintah daerah dan ASN	Penguatan kerja sama dengan kejaksaan dan instansi pemberi bantuan hukum lainnya
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Pengembangan sistem informasi ekonomi daerah secara terpadu	Integrasi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan daerah.
		Fasilitasi pengembangan sektor unggulan dan investasi daerah.	Penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi yang berbasis evidence.
		Penguatan sinergi lintas	Fasilitasi kerja sama ekonomi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		sektor dan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah	antara pemprov, kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan
			Penyelenggaraan forum koordinasi pembangunan ekonomi daerah secara rutin
			Dukungan terhadap pengembangan sektor prioritas melalui kebijakan insentif dan kemitraan strategis
		Peningkatan kualitas SDM pengelola badan usaha daerah melalui pelatihan, sertifikasi, dan tata kelola profesional.	Fasilitasi pelatihan manajemen usaha dan keuangan untuk pengelola BUMD/BLUD
			Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan hukum, efektivitas operasional, dan kontribusi BUMD terhadap PAD
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan	Modernisasi sistem pengadaan melalui platform elektronik.	Penggunaan e-katalog dan e-procurement secara menyeluruh.
		Penguatan pengawasan dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.	Pengembangan kapasitas UKPBJ dan pemangku kepentingan pengadaan.
		Meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan melalui pemanfaatan penuh sistem elektronik.	Penyempurnaan prosedur layanan pengadaan berbasis digital end-to-end.
			Meningkatkan integrasi sistem pengadaan dengan perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM pengadaan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan teknis	Penyelenggaraan bimbingan teknis dan uji kompetensi bersertifikat untuk personel PBJ.
			Penempatan SDM PBJ sesuai kualifikasi dan kebutuhan teknis
		Penguatan fungsi kelembagaan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) menuju kategori “Center of Excellence (CoE)	Peningkatan level kematangan UKPBJ melalui penilaian mandiri dan fasilitasi perbaikan struktur organisasi
			Pengembangan layanan advokasi pengadaan kepada OPD dan stakeholder.
			Penerapan mekanisme konsultasi dan mitigasi risiko pengadaan secara preventif dan terstruktur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Kelembagaan yang Efektif	Implementasi reformasi birokrasi dan sistem merit ASN yang berfokus pada hasil (result-oriented bureaucracy) .	Evaluasi struktur organisasi dan proses bisnis pemerintahan.
			Penerapan manajemen kinerja birokrasi berbasis digital dan integratif
		Penataan kelembagaan berbasis efisiensi dan hasil kinerja.	Peningkatan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
		Peningkatan efektivitas sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.	Integrasi SAKIP dengan sistem e-kinerja dan e-planning
			Pendampingan penyusunan cascading kinerja dan indikator utama (IKU) pada seluruh OPD
		Penguatan inovasi dan standar pelayanan publik	Fasilitasi penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara berkala
			Pengembangan mal pelayanan publik dan digitalisasi kanal layanan.
		Peningkatan kualitas dan penataan struktur kelembagaan yang adaptif dan fungsional	Review dan evaluasi kelembagaan secara periodik
			Penyesuaian nomenklatur, tupoksi, dan kebutuhan SDM sesuai beban kerja dan arah pembangunan.
			Pendampingan revisi Perda SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) OPD
	Meningkatnya Tata Kelola Layanan Kerumahtanggaan, Keuangan, Aset dan Administrasi Pimpinan	Penerapan prinsip good governance dan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan kerumahtanggaan
		Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset lingkup sekretariat daerah.	Digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset lingkup sekretariat daerah.
		Modernisasi sistem pengelolaan administrasi dan layanan perkantoran	Penerapan sistem informasi administrasi perkantoran dan arsip elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		berbasis digital dan responsif	
			Penerapan SOP layanan perkantoran dan administrasi pimpinan yang terstandar
			Peningkatan kapasitas SDM layanan internal melalui pelatihan teknis
		Peningkatan kualitas dukungan materi, dokumentasi, komunikasi, dan protokoler pimpinan secara profesional	Penguatan tim penyiapan materi dan komunikasi pimpinan secara terstruktur dan berbasis data
			Internalisasi kapasitas keprotokoleran dan etika pemerintahan secara berkala
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan
			Pembentukan sistem kerja terpadu antarunit untuk mendukung kecepatan layanan pimpinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan serta subkegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Disertai dengan Pendanaan Sekretariat Daerah pada Tabel 6.1 Terlampir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2030)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	**Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**								
	Efektivitas kerjasama daerah (persentase kerjasama daerah yang mencapai tujuan yang ditetapkan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	66.61	73.16	76.44	79.72	83.00	83.00	83.00
	Jumlah orang yang melalui bandara	Orang	48.770	60.085	67.896	76.722	86.696	86.696	86.696
	Jumlah barang yang melalui bandara	Barang	417.741	434.618	44.3310	452.176	461.220	461.220	461.220
2.	**Biro Hukum**								
	Persentase Produk Hukum yang di hasilkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Bantuan Hukum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**								
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Persen	26	30	31.72	33.40	35	35	35
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	90.73	91.50	92	92.50	93	93.50	93.50
4.	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**								
	Level Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3	4	4	5	5
5.	**Biro Organisasi**								
	Indeks Kelembagaan	Indeks	65.03	67	70	73	76	80	80
	Indeks Ber-Akhlak	Indeks	69.8	72.9	74.7	76.6	78.9	80.7	82.5
6.	**Biro Umum**								
	Tingkat Kepuasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah terhadap Pelayanan Biro Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VIII
PENUTUP

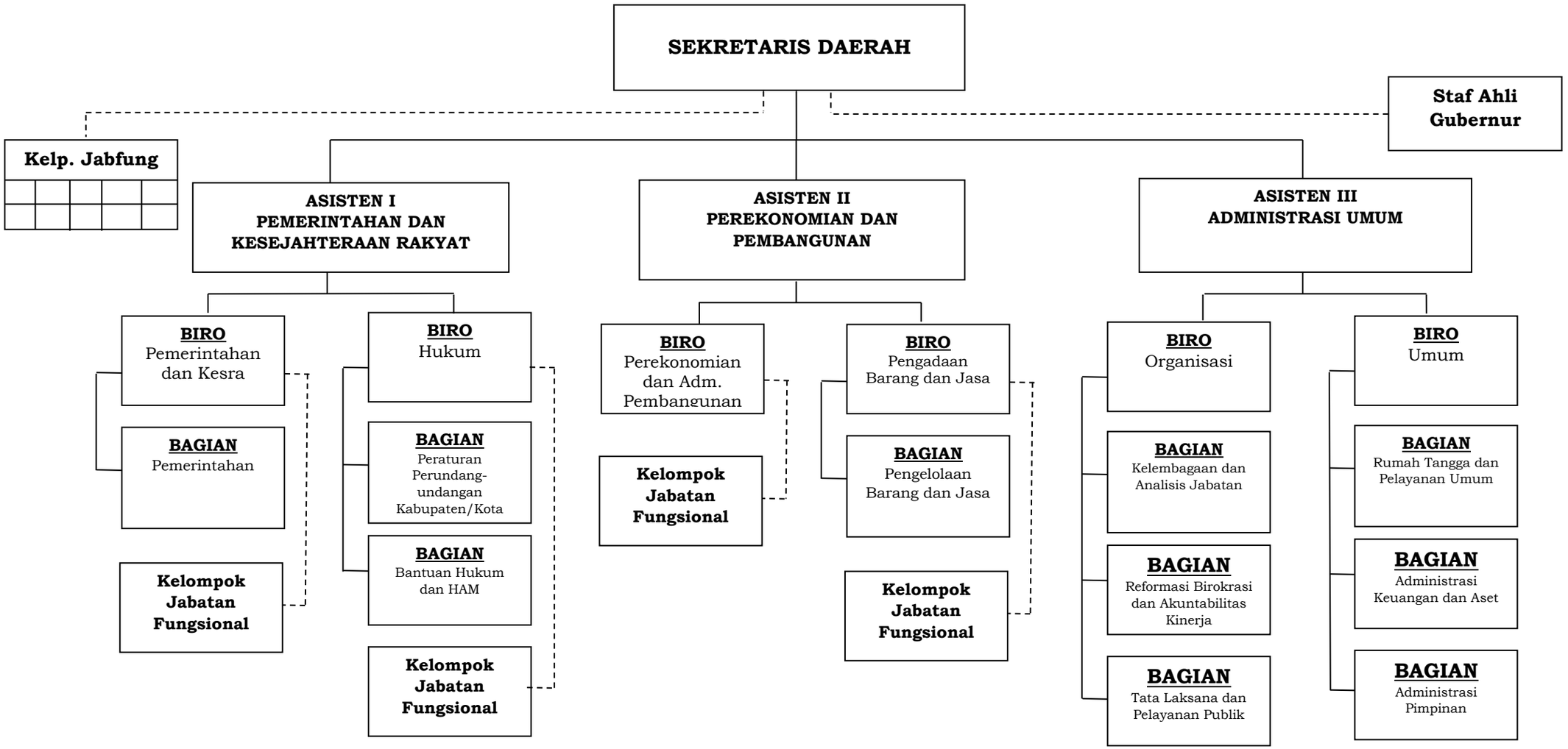
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karenanya seluruh program pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra berperan sebagai instrumen perencanaan sektoral/organisasi yang menerjemahkan kebijakan makro RPJMD ke dalam rencana kerja teknis yang dapat diukur capaian kinerjanya. RPJMD dan Renstra diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan tahunan (RKPD dan Renja) disusun berdasarkan dokumen RPJMD dan Renstra, sehingga menjamin kesinambungan dan keterpaduan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi instrumen strategis dan operasional yang mampu mengarahkan peran Sekretariat Daerah secara lebih fokus, terukur dan kolaboratif untuk mewujudkan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis dengan optimal dibutuhkan sinergi lintas biro, dukungan stakeholder dan monitoring berkala. Dengan keterlibatan aktif seluruh biro, didukung data dan informasi yang andal serta tata kelola yang adaptif, pelaksanaan Renstra ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II

Struktur Organisasi Staf Ahli Gubernur



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran III

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				6,000,000,000.00		16,000,000,000.00		18,000,000,000.00		20,000,000,000.00		20,000,000,000.00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD (Persentase)	97,62	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Nilai SAKIP OPD (Poin)	68,79	72		74		76		78		80		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Indeks SPBE OPD (Indeks)	3,70	3,90		4,00		4,10		4,20		4,30		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Indeks Pengelolaan Aset OPD (Indeks)	2,50	2,70		2,80		2,90		3,00		3,10		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				116,440,000.00		116,440,000.00		116,440,000.00		116,440,000.00		116,440,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Biro Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	41,230,000.00	1	41,230,000.00	1	41,230,000.00	1	41,230,000.00	1	41,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	6,430,000.00	1	6,430,000.00	1	6,430,000.00	1	6,430,000.00	1	6,430,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	26,500,000.00	3	26,500,000.00	3	26,500,000.00	3	26,500,000.00	3	26,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3,010,000.00	1	3,010,000.00	1	3,010,000.00	1	3,010,000.00	1	3,010,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	18,540,000.00	1	18,540,000.00	1	18,540,000.00	1	18,540,000.00	1	18,540,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	18,230,000.00	1	18,230,000.00	1	18,230,000.00	1	18,230,000.00	1	18,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				26,500,000.00		26,500,000.00		26,500,000.00		26,500,000.00		26,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	26,500,000.00	3	26,500,000.00	3	26,500,000.00	3	26,500,000.00	3	26,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				18,230,000.00		18,230,000.00		18,230,000.00		18,230,000.00		18,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	18,230,000.00	1	18,230,000.00	1	18,230,000.00	1	18,230,000.00	1	18,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				18,540,000.00		18,540,000.00		18,540,000.00		18,540,000.00		18,540,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	18,540,000.00	1	18,540,000.00	1	18,540,000.00	1	18,540,000.00	1	18,540,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3,010,000.00		3,010,000.00		3,010,000.00		3,010,000.00		3,010,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3,010,000.00	1	3,010,000.00	1	3,010,000.00	1	3,010,000.00	1	3,010,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				41,230,000.00		41,230,000.00		41,230,000.00		41,230,000.00		41,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	41,230,000.00	1	41,230,000.00	1	41,230,000.00	1	41,230,000.00	1	41,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,430,000.00		6,430,000.00		6,430,000.00		6,430,000.00		6,430,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	6,430,000.00	1	6,430,000.00	1	6,430,000.00	1	6,430,000.00	1	6,430,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,030,000.00		4,030,000.00		4,030,000.00		4,030,000.00		4,030,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatanya Capaian Keuangan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	800,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	2,230,000.00	1	2,230,000.00	1	2,230,000.00	1	2,230,000.00	1	2,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2,230,000.00		2,230,000.00		2,230,000.00		2,230,000.00		2,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	2,230,000.00	1	2,230,000.00	1	2,230,000.00	1	2,230,000.00	1	2,230,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	800,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	3,200,000.00	1	3,200,000.00	1	3,200,000.00	1	3,200,000.00	1	3,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	3,200,000.00	1	3,200,000.00	1	3,200,000.00	1	3,200,000.00	1	3,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				178,690,000.00		178,690,000.00		168,690,000.00		178,690,000.00		178,690,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tingkat Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	54,000,000.00	5	54,000,000.00	5	45,000,000.00	5	54,000,000.00	5	54,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	43,290,000.00	1	43,290,000.00	1	43,290,000.00	1	43,290,000.00	1	43,290,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	56,400,000.00	1	56,400,000.00	1	55,400,000.00	1	56,400,000.00	1	56,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya				43,290,000.00		43,290,000.00		43,290,000.00		43,290,000.00		43,290,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	43,290,000.00	1	43,290,000.00	1	43,290,000.00	1	43,290,000.00	1	43,290,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				56,400,000.00		56,400,000.00		55,400,000.00		56,400,000.00		56,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	56,400,000.00	1	56,400,000.00	1	55,400,000.00	1	56,400,000.00	1	56,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				54,000,000.00		54,000,000.00		45,000,000.00		54,000,000.00		54,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	54,000,000.00	5	54,000,000.00	5	45,000,000.00	5	54,000,000.00	5	54,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				365,598,670.00		365,598,670.00		355,598,670.00		365,598,670.00		365,598,670.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	269,628,670.00	2	269,628,670.00	2	269,628,670.00	2	269,628,670.00	2	269,628,670.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	15,340,000.00	1	15,340,000.00	1	15,340,000.00	1	15,340,000.00	1	15,340,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	42,390,000.00	2	42,390,000.00	2	32,390,000.00	2	42,390,000.00	2	42,390,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	22,450,000.00	2	22,450,000.00	2	22,450,000.00	2	22,450,000.00	2	22,450,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	13,290,000.00	2	13,290,000.00	2	13,290,000.00	2	13,290,000.00	2	13,290,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42,390,000.00		42,390,000.00		32,390,000.00		42,390,000.00		42,390,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	42,390,000.00	2	42,390,000.00	2	32,390,000.00	2	42,390,000.00	2	42,390,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13,290,000.00		13,290,000.00		13,290,000.00		13,290,000.00		13,290,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	13,290,000.00	2	13,290,000.00	2	13,290,000.00	2	13,290,000.00	2	13,290,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				22,450,000.00		22,450,000.00		22,450,000.00		22,450,000.00		22,450,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	22,450,000.00	2	22,450,000.00	2	22,450,000.00	2	22,450,000.00	2	22,450,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				269,628,670.00		269,628,670.00		269,628,670.00		269,628,670.00		269,628,670.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	269,628,670.00	2	269,628,670.00	2	269,628,670.00	2	269,628,670.00	2	269,628,670.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15,340,000.00		15,340,000.00		15,340,000.00		15,340,000.00		15,340,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	15,340,000.00	1	15,340,000.00	1	15,340,000.00	1	15,340,000.00	1	15,340,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				136,000,000.00		136,000,000.00		156,000,000.00		136,000,000.00		136,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	-	1	45,000,000.00	0	-	0	-	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	2	75,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		45,000,000.00		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	-	1	45,000,000.00	0	-	0	-	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100,000,000.00		100,000,000.00		75,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	2	75,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	3	1,500,000.00	3	1,500,000.00	3	1,500,000.00	3	1,500,000.00	3	1,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	3	1,500,000.00	3	1,500,000.00	3	1,500,000.00	3	1,500,000.00	3	1,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194,541,330.00		194,541,330.00		194,541,330.00		194,541,330.00		194,541,330.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	2	145,320,000.00	2	145,320,000.00	2	145,320,000.00	2	145,320,000.00	2	145,320,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	5	8,491,330.00	5	8,491,330.00	5	8,491,330.00	5	8,491,330.00	5	8,491,330.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5	25,430,000.00	5	25,430,000.00	5	25,430,000.00	5	25,430,000.00	5	25,430,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				145,320,000.00		145,320,000.00		145,320,000.00		145,320,000.00		145,320,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	2	145,320,000.00	2	145,320,000.00	2	145,320,000.00	2	145,320,000.00	2	145,320,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15,300,000.00		15,300,000.00		15,300,000.00		15,300,000.00		15,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8,491,330.00		8,491,330.00		8,491,330.00		8,491,330.00		8,491,330.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	5	8,491,330.00	5	8,491,330.00	5	8,491,330.00	5	8,491,330.00	5	8,491,330.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25,430,000.00		25,430,000.00		25,430,000.00		25,430,000.00		25,430,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5	25,430,000.00	5	25,430,000.00	5	25,430,000.00	5	25,430,000.00	5	25,430,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				4,000,000,000.00		8,000,000,000.00		9,000,000,000.00		10,000,000,000.00		10,000,000,000.00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja Penyelenggaran Daerah (Poin)	1,39 (Sangat Rendah) (2023)	2,69 (sedang)	4,000,000,000.00	2,87 (Sedang)	8,000,000,000.00	2,97 (Sedang)	9,000,000,000.00	3,21 (Sedang)	10,000,000,000.00	3,4 (Tinggi)	10,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Efektivitas kerjasama daerah (persentase kerjasama daerah yang mencapai tujuan yang ditetapkan) (%)	0	100		100		100		100		100		
4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				1,133,490,000.00		2,622,617,000.00		3,000,000,000.00		3,448,600,000.00		3,448,600,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terfasilitasinya Tugas Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	2	1	532,900,000.00	1	953,240,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,325,400,000.00	1	1,325,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	2	1	346,210,000.00	1	977,980,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,123,200,000.00	1	1,123,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	1	1	254,380,000.00	1	691,397,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				532,900,000.00		953,240,000.00		1,000,000,000.00		1,325,400,000.00		1,325,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	2	1	532,900,000.00	1	953,240,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,325,400,000.00	1	1,325,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.01.0002 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				346,210,000.00		977,980,000.00		1,000,000,000.00		1,123,200,000.00		1,123,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	2	1	346,210,000.00	1	977,980,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,123,200,000.00	1	1,123,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah				254,380,000.00		691,397,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	1	1	254,380,000.00	1	691,397,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah				1,501,317,000.00		2,714,450,000.00		3,000,000,000.00		3,567,500,000.00		3,567,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terfasilitasinya Tugas Bidang Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	3	1	697,607,000.00	2	896,453,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,324,500,000.00	2	1,324,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	2	2	553,280,000.00	2	985,437,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,243,000,000.00	2	1,243,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	2	250,430,000.00	2	832,560,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				697,607,000.00		896,453,000.00		1,000,000,000.00		1,324,500,000.00		1,324,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	3	1	697,607,000.00	2	896,453,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,324,500,000.00	2	1,324,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				250,430,000.00		832,560,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	2	250,430,000.00	2	832,560,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				553,280,000.00		985,437,000.00		1,000,000,000.00		1,243,000,000.00		1,243,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	2	2	553,280,000.00	2	985,437,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,243,000,000.00	2	1,243,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				1,365,193,000.00		2,662,933,000.00		3,000,000,000.00		2,983,900,000.00		2,983,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terfasilitasinya Tugas Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	0	3	444,893,000.00	3	985,640,000.00	3	1,000,000,000.00	3	1,000,000,000.00	3	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	0	1	487,650,000.00	1	89,650,000.00	1	1,000,000,000.00	1	862,900,000.00	1	862,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	1	1	432,650,000.00	3	1,587,643,000.00	3	1,000,000,000.00	3	1,121,000,000.00	3	1,121,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				432,650,000.00		1,587,643,000.00		1,000,000,000.00		1,121,000,000.00		1,121,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	1	1	432,650,000.00	3	1,587,643,000.00	3	1,000,000,000.00	3	1,121,000,000.00	3	1,121,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03.1.03.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				444,893,000.00		985,640,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	0	3	444,893,000.00	3	985,640,000.00	3	1,000,000,000.00	3	1,000,000,000.00	3	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				487,650,000.00		89,650,000.00		1,000,000,000.00		862,900,000.00		862,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	0	1	487,650,000.00	1	89,650,000.00	1	1,000,000,000.00	1	862,900,000.00	1	862,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				1,000,000,000.00		7,000,000,000.00		8,000,000,000.00		9,000,000,000.00		9,000,000,000.00	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Proporsi individu yang menggunakan internet (%)	66,61	73,16	1,000,000,000.00	76,44	7,000,000,000.00	79,72	8,000,000,000.00	83	9,000,000,000.00	83	9,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah orang yang melalui bandara (Orang)	48.770	60.085		67.896		76.722		86.696		86.696		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah barang yang melalui bandara (Kg)	417.741	434.618		443.310		452.176		461.220		461.220		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				570,770,000.00		4,898,157,000.00		5,839,084,700.00		6,299,010,000.00		6,299,010,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	147	5	140,000,000.00	112	2,398,157,000.00	145	3,109,084,700.00	160	3,438,110,000.00	160	3,438,110,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4	1	430,770,000.00	1	2,500,000,000.00	1	2,730,000,000.00	1	2,860,900,000.00	1	2,860,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				140,000,000.00		2,398,157,000.00		3,109,084,700.00		3,438,110,000.00		3,438,110,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	147	5	140,000,000.00	112	2,398,157,000.00	145	3,109,084,700.00	160	3,438,110,000.00	160	3,438,110,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				430,770,000.00		2,500,000,000.00		2,730,000,000.00		2,860,900,000.00		2,860,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4	1	430,770,000.00	1	2,500,000,000.00	1	2,730,000,000.00	1	2,860,900,000.00	1	2,860,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				221,380,000.00		1,848,260,000.00		1,902,551,300.00		2,420,818,000.00		2,420,818,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi pada Layanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	0	1	78,630,000.00	1	98,320,000.00	1	101,210,000.00	1	119,200,000.00	1	119,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	0	1	66,320,000.00	1	99,830,000.00	1	101,221,300.00	1	101,298,000.00	1	101,298,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	76,430,000.00	1	1,650,110,000.00	1	1,700,120,000.00	1	2,200,320,000.00	1	2,200,320,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02.0001 - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				76,430,000.00		1,650,110,000.00		1,700,120,000.00		2,200,320,000.00		2,200,320,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	76,430,000.00	1	1,650,110,000.00	1	1,700,120,000.00	1	2,200,320,000.00	1	2,200,320,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				78,630,000.00		98,320,000.00		101,210,000.00		119,200,000.00		119,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	0	1	78,630,000.00	1	98,320,000.00	1	101,210,000.00	1	119,200,000.00	1	119,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				66,320,000.00		99,830,000.00		101,221,300.00		101,298,000.00		101,298,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	0	1	66,320,000.00	1	99,830,000.00	1	101,221,300.00	1	101,298,000.00	1	101,298,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				207,850,000.00		253,583,000.00		258,364,000.00		280,172,000.00		280,172,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi pada Layanan Non Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	1	1	56,320,000.00	1	88,943,000.00	1	90,832,000.00	1	100,210,000.00	1	100,210,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	0	1	75,320,000.00	1	87,320,000.00	1	88,732,000.00	1	90,222,000.00	1	90,222,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	0	1	76,210,000.00	1	77,320,000.00	1	78,800,000.00	1	89,740,000.00	1	89,740,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				56,320,000.00		88,943,000.00		90,832,000.00		100,210,000.00		100,210,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,	1	1	56,320,000.00	1	88,943,000.00	1	90,832,000.00	1	100,210,000.00	1	100,210,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)												
4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				76,210,000.00		77,320,000.00		78,800,000.00		89,740,000.00		89,740,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	0	1	76,210,000.00	1	77,320,000.00	1	78,800,000.00	1	89,740,000.00	1	89,740,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				75,320,000.00		87,320,000.00		88,732,000.00		90,222,000.00		90,222,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	0	1	75,320,000.00	1	87,320,000.00	1	88,732,000.00	1	90,222,000.00	1	90,222,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
TOTAL				**6,000,000,000.00**		**16,000,000,000.00**		**18,000,000,000.00**		**20,000,000,000.00**		**20,000,000,000.00**	

Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah Biro Hukum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				3,000,000,000.00		4,000,000,000.00		5,000,000,000.00		6,000,000,000.00		7,000,000,000.00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah	Indeks Pengelolaan Aset OPD (Indeks)	2,50	2,70	1,000,000,000.00	2,80	1,000,000,000.00	2,90	1,000,000,000.00	3,00	1,000,000,000.00	3,10	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Indeks SPBE OPD (Indeks)	3,70	3,90		4,00		4,10		4,20		4,30		4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Nilai SAKIP OPD (Poin)	68,79	72		74		76		78		80		4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD (Persentase)	97,62	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				175,000,000.00		175,000,000.00		175,000,000.00		175,000,000.00		175,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Biro Hukum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Biro Hukum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				85,000,000.00		85,000,000.00		85,000,000.00		85,000,000.00		85,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	1	85,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Hukum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Hukum	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Lingkup Biro Hukum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	85	90	160,000,000.00	90	160,000,000.00	90	160,000,000.00	90	160,000,000.00	100	160,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD				160,000,000.00		160,000,000.00		160,000,000.00		160,000,000.00		160,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	85	90	160,000,000.00	90	160,000,000.00	90	160,000,000.00	90	160,000,000.00	100	160,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Lingkup Biro Hukum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145,000,000.00		145,000,000.00		145,000,000.00		145,000,000.00		145,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Hukum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	80,000,000.00	11	80,000,000.00	11	80,000,000.00	11	80,000,000.00	11	80,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	11	80,000,000.00	11	80,000,000.00	11	80,000,000.00	11	80,000,000.00	11	80,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	13	25,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		4,000,000,000.00		5,000,000,000.00		6,000,000,000.00	
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	95	96	2,000,000,000.00	97	3,000,000,000.00	97	4,000,000,000.00	98	5,000,000,000.00	98	6,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum yang di hasilkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Bantuan Hukum yang diselesaikan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1,350,000,000.00		2,100,000,000.00		2,500,000,000.00		3,300,000,000.00		4,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya penyusunan dan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum provinsi lainnya serta fasilitasi dan evaluasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	148	150	400,000,000.00	150	600,000,000.00	150	700,000,000.00	150	900,000,000.00	150	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	31	40	450,000,000.00	40	800,000,000.00	40	900,000,000.00	40	1,000,000,000.00	40	1,200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	559	500	250,000,000.00	500	300,000,000.00	500	400,000,000.00	500	700,000,000.00	500	900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	653	560	250,000,000.00	560	400,000,000.00	560	500,000,000.00	560	700,000,000.00	560	900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				450,000,000.00		800,000,000.00		900,000,000.00		1,000,000,000.00		1,200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	31	40	450,000,000.00	40	800,000,000.00	40	900,000,000.00	40	1,000,000,000.00	40	1,200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				250,000,000.00		300,000,000.00		400,000,000.00		700,000,000.00		900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	559	500	250,000,000.00	500	300,000,000.00	500	400,000,000.00	500	700,000,000.00	500	900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				250,000,000.00		400,000,000.00		500,000,000.00		700,000,000.00		900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	653	560	250,000,000.00	560	400,000,000.00	560	500,000,000.00	560	700,000,000.00	560	900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				400,000,000.00		600,000,000.00		700,000,000.00		900,000,000.00		1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	148	150	400,000,000.00	150	600,000,000.00	150	700,000,000.00	150	900,000,000.00	150	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum				650,000,000.00		900,000,000.00		1,500,000,000.00		1,700,000,000.00		2,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya fasilitasi/pendampingan penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi serta pelaporan aksi HAM	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	2	2	400,000,000.00	2	500,000,000.00	2	800,000,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	2	2	250,000,000.00	2	400,000,000.00	2	700,000,000.00	2	700,000,000.00	2	900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				400,000,000.00		500,000,000.00		800,000,000.00		1,000,000,000.00		1,100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	2	2	400,000,000.00	2	500,000,000.00	2	800,000,000.00	2	1,000,000,000.00	2	1,100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				250,000,000.00		400,000,000.00		700,000,000.00		700,000,000.00		900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	2	2	250,000,000.00	2	400,000,000.00	2	700,000,000.00	2	700,000,000.00	2	900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum
TOTAL				**3,000,000,000.00**		**4,000,000,000.00**		**5,000,000,000.00**		**6,000,000,000.00**		**7,000,000,000.00**	

Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				6,000,000,000.00		10,000,000,000.00		11,000,000,000.00		12,000,000,000.00		12,000,000,000.00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD (Persentase)	97,62	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Indeks Pengelolaan Aset OPD (Indeks)	2,50	2,70		2,80		2,90		3,00		3,10		4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Indeks SPBE OPD (Indeks)	3,70	3,90		4,00		4,10		4,20		4,30		4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Nilai SAKIP OPD (Poin)	68,79	72		74		76		78		80		4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				142,500,000.00		142,500,000.00		142,500,000.00		142,500,000.00		142,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	93,100,000.00	2	93,100,000.00	2	93,100,000.00	2	93,100,000.00	2	93,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	32,000,000.00	1	32,000,000.00	1	32,000,000.00	1	32,000,000.00	1	32,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32,000,000.00		32,000,000.00		32,000,000.00		32,000,000.00		32,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	32,000,000.00	1	32,000,000.00	1	32,000,000.00	1	32,000,000.00	1	32,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				93,100,000.00		93,100,000.00		93,100,000.00		93,100,000.00		93,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	93,100,000.00	2	93,100,000.00	2	93,100,000.00	2	93,100,000.00	2	93,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				161,600,000.00		161,600,000.00		161,600,000.00		161,600,000.00		161,600,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17,400,000.00		17,400,000.00		17,400,000.00		17,400,000.00		17,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Laporan Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				95,000,000.00		95,000,000.00		95,000,000.00		95,000,000.00		95,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tingkat Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00	2	35,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				373,200,000.00		373,200,000.00		373,200,000.00		373,200,000.00		373,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Penhyelenggaraan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	24	200,000,000.00	24	200,000,000.00	24	200,000,000.00	24	200,000,000.00	24	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	4	2,900,000.00	4	2,900,000.00	4	2,900,000.00	4	2,900,000.00	4	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	4	2,900,000.00	4	2,900,000.00	4	2,900,000.00	4	2,900,000.00	4	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	24	200,000,000.00	24	200,000,000.00	24	200,000,000.00	24	200,000,000.00	24	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17,400,000.00		17,400,000.00		17,400,000.00		17,400,000.00		17,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	1	2,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190,000,000.00		190,000,000.00		190,000,000.00		190,000,000.00		190,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	8	20,000,000.00	8	20,000,000.00	8	20,000,000.00	8	20,000,000.00	8	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	110,000,000.00	9	110,000,000.00	9	110,000,000.00	9	110,000,000.00	9	110,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	110,000,000.00	9	110,000,000.00	9	110,000,000.00	9	110,000,000.00	9	110,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	8	20,000,000.00	8	20,000,000.00	8	20,000,000.00	8	20,000,000.00	8	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4,000,000,000.00		8,000,000,000.00		9,000,000,000.00		10,000,000,000.00		10,000,000,000.00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	26	30	4,000,000,000.00	31.72	8,000,000,000.00	33.40	9,000,000,000.00	35	10,000,000,000.00	35	10,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				2,100,000,000.00		4,200,000,000.00		4,400,000,000.00		4,700,000,000.00		4,700,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	2	6	600,000,000.00	10	1,500,000,000.00	10	1,500,000,000.00	12	1,700,000,000.00	12	1,700,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	3	6	1,500,000,000.00	8	2,700,000,000.00	10	2,900,000,000.00	12	3,000,000,000.00	12	3,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1,500,000,000.00		2,700,000,000.00		2,900,000,000.00		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	3	6	1,500,000,000.00	8	2,700,000,000.00	10	2,900,000,000.00	12	3,000,000,000.00	12	3,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				600,000,000.00		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	2	6	600,000,000.00	10	1,500,000,000.00	10	1,500,000,000.00	12	1,700,000,000.00	12	1,700,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				800,000,000.00		1,000,000,000.00		1,100,000,000.00		1,300,000,000.00		1,200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	0	4	200,000,000.00	6	300,000,000.00	8	350,000,000.00	10	400,000,000.00	10	400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	2	3	400,000,000.00	3	400,000,000.00	3	400,000,000.00	6	500,000,000.00	6	400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	2	200,000,000.00	4	300,000,000.00	6	350,000,000.00	8	400,000,000.00	8	400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				200,000,000.00		300,000,000.00		350,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	0	4	200,000,000.00	6	300,000,000.00	8	350,000,000.00	10	400,000,000.00	10	400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.02.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				200,000,000.00		300,000,000.00		350,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	2	200,000,000.00	4	300,000,000.00	6	350,000,000.00	8	400,000,000.00	8	400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.02.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		500,000,000.00		400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	2	3	400,000,000.00	3	400,000,000.00	3	400,000,000.00	6	500,000,000.00	6	400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				1,100,000,000.00		2,800,000,000.00		3,500,000,000.00		4,000,000,000.00		4,100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kebijakan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	2	4	400,000,000.00	6	700,000,000.00	8	900,000,000.00	10	1,000,000,000.00	10	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	2	4	300,000,000.00	5	400,000,000.00	8	700,000,000.00	10	900,000,000.00	10	900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	2	6	300,000,000.00	8	1,600,000,000.00	9	1,800,000,000.00	10	2,000,000,000.00	11	2,100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				300,000,000.00		1,600,000,000.00		1,800,000,000.00		2,000,000,000.00		2,100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	2	6	300,000,000.00	8	1,600,000,000.00	9	1,800,000,000.00	10	2,000,000,000.00	11	2,100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.03.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				300,000,000.00		400,000,000.00		700,000,000.00		900,000,000.00		900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	2	4	300,000,000.00	5	400,000,000.00	8	700,000,000.00	10	900,000,000.00	10	900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.03.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.03.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				400,000,000.00		700,000,000.00		900,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	2	4	400,000,000.00	6	700,000,000.00	8	900,000,000.00	10	1,000,000,000.00	10	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.06.1.03.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Dokumen)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	90.73	91.5	1,000,000,000.00	92	1,000,000,000.00	92.5	1,000,000,000.00	93	1,000,000,000.00	93.5	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				600,000,000.00		600,000,000.00		600,000,000.00		600,000,000.00		600,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat Capaian Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	2	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	2	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	0	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	0	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.08.1.01.0002 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	2	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.08.1.01.0003 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	2	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Penyediaan Laporan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	0	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	2	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.08.1.02.0001 - Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	0	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	2	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4.01.08.1.02.0003 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
TOTAL				**6,000,000,000.00**		**10,000,000,000.00**		**11,000,000,000.00**		**12,000,000,000.00**		**12,000,000,000.00**	

Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				3,000,000,000.00		3,500,000,000.00		3,500,000,000.00		4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Poin)	68,79	72	1,000,000,000.00	74	1,000,000,000.00	76	1,000,000,000.00	78	1,000,000,000.00	80	1,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD (Persentase)	97,62	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Indeks SPBE OPD (Indeks)	3,70	3,90		4,00		4,10		4,20		4,30		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Indeks Pengelolaan Aset OPD (Indeks)	2,50	2,70		2,80		2,90		3,00		3,10		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				290,000,000.00		290,000,000.00		290,000,000.00		290,000,000.00		290,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tingkat Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	0	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	0	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				230,000,000.00		230,000,000.00		230,000,000.00		230,000,000.00		230,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-		-		-		-		-	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	30	100,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160,000,000.00		160,000,000.00		160,000,000.00		160,000,000.00		160,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	50,000,000.00	7	50,000,000.00	7	50,000,000.00	7	50,000,000.00	7	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	50,000,000.00	7	50,000,000.00	7	50,000,000.00	7	50,000,000.00	7	50,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2,000,000,000.00		2,500,000,000.00		2,500,000,000.00		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	77.78	83	2,000,000,000.00	85	2,500,000,000.00	87	2,500,000,000.00	89	3,000,000,000.00	90	3,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				680,000,000.00		850,000,000.00		850,000,000.00		1,020,000,000.00		1,020,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	2	2	230,000,000.00	2	285,000,000.00	2	285,000,000.00	2	340,000,000.00	2	340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	220,000,000.00	4	280,000,000.00	4	280,000,000.00	4	340,000,000.00	4	340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	230,000,000.00	4	285,000,000.00	4	285,000,000.00	4	340,000,000.00	4	340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				230,000,000.00		285,000,000.00		285,000,000.00		340,000,000.00		340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	2	2	230,000,000.00	2	285,000,000.00	2	285,000,000.00	2	340,000,000.00	2	340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				230,000,000.00		285,000,000.00		285,000,000.00		340,000,000.00		340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	230,000,000.00	4	285,000,000.00	4	285,000,000.00	4	340,000,000.00	4	340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				220,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00		340,000,000.00		340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	220,000,000.00	4	280,000,000.00	4	280,000,000.00	4	340,000,000.00	4	340,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				660,000,000.00		825,000,000.00		825,000,000.00		990,000,000.00		990,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	220,000,000.00	4	275,000,000.00	4	275,000,000.00	4	330,000,000.00	4	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	220,000,000.00	4	275,000,000.00	4	275,000,000.00	4	330,000,000.00	4	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4	4	220,000,000.00	4	275,000,000.00	4	275,000,000.00	4	330,000,000.00	4	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				220,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		330,000,000.00		330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4	4	220,000,000.00	4	275,000,000.00	4	275,000,000.00	4	330,000,000.00	4	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				220,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		330,000,000.00		330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	220,000,000.00	4	275,000,000.00	4	275,000,000.00	4	330,000,000.00	4	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				220,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		330,000,000.00		330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	4	220,000,000.00	4	275,000,000.00	4	275,000,000.00	4	330,000,000.00	4	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				660,000,000.00		825,000,000.00		825,000,000.00		990,000,000.00		990,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	15	15	220,000,000.00	20	275,000,000.00	20	275,000,000.00	30	330,000,000.00	30	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	2	220,000,000.00	2	275,000,000.00	2	275,000,000.00	2	330,000,000.00	2	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	3	2	220,000,000.00	2	275,000,000.00	2	275,000,000.00	2	330,000,000.00	2	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				220,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		330,000,000.00		330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	15	15	220,000,000.00	20	275,000,000.00	20	275,000,000.00	30	330,000,000.00	30	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				220,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		330,000,000.00		330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	3	2	220,000,000.00	2	275,000,000.00	2	275,000,000.00	2	330,000,000.00	2	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				220,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		330,000,000.00		330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	2	220,000,000.00	2	275,000,000.00	2	275,000,000.00	2	330,000,000.00	2	330,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa
TOTAL				**3,000,000,000.00**		**3,500,000,000.00**		**3,500,000,000.00**		**4,000,000,000.00**		**4,000,000,000.00**	

Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah Biro Organisasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				3,000,000,000.00		3,250,000,000.00		3,500,000,000.00		3,500,000,000.00		3,490,000,000.00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		990,000,000.00	
Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah	Indeks SPBE OPD (Indeks)	3,70	3,90	1,000,000,000.00	4,00	1,000,000,000.00	4,10	1,000,000,000.00	4,20	1,000,000,000.00	4,3	990,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD (Persentase)	97,62	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Nilai SAKIP OPD (Poin)	68,79	72		74		76		78		80		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Indeks Pengelolaan Aset OPD (Indeks)	2,50	2,70		2,80		2,90		3,00		3,10		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				170,731,704.00		170,731,704.00		170,731,704.00		170,731,704.00		170,731,704.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Biro Organisasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0	2	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	24,390,240.00	2	24,390,240.00	2	24,390,240.00	2	24,390,240.00	2	24,390,240.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24,390,240.00		24,390,240.00		24,390,240.00		24,390,240.00		24,390,240.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	24,390,240.00	2	24,390,240.00	2	24,390,240.00	2	24,390,240.00	2	24,390,240.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	6	24,390,244.00	6	24,390,244.00	6	24,390,244.00	6	24,390,244.00	6	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	6	24,390,244.00	6	24,390,244.00	6	24,390,244.00	6	24,390,244.00	6	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Organisasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00		97,560,976.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tingkat Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	9	24,390,244.00	11	24,390,244.00	13	24,390,244.00	15	24,390,244.00	17	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	50	24,390,244.00	50	24,390,244.00	55	24,390,244.00	55	24,390,244.00	60	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	50	24,390,244.00	50	24,390,244.00	55	24,390,244.00	55	24,390,244.00	60	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	9	24,390,244.00	11	24,390,244.00	13	24,390,244.00	15	24,390,244.00	17	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				195,121,952.00		195,121,952.00		195,121,952.00		195,121,952.00		195,121,952.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Lingkup Biro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	24,390,244.00	20	24,390,244.00	25	24,390,244.00	25	24,390,244.00	30	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				14,390,244.00		14,390,244.00		14,390,244.00		14,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	24,390,244.00	20	24,390,244.00	25	24,390,244.00	25	24,390,244.00	30	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				146,341,464.00		146,341,464.00		146,341,464.00		146,341,464.00		146,341,464.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Organisasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	3	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73,170,732.00		73,170,732.00		73,170,732.00		73,170,732.00		73,170,732.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Lingkup Biro Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121,951,220.00		121,951,220.00		121,951,220.00		121,951,220.00		111,951,220.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Organisasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4	24,390,244.00	4	24,390,244.00	4	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	24,390,244.00	13	24,390,244.00	13	24,390,244.00	13	24,390,244.00	13	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	11	24,390,244.00	11	24,390,244.00	12	24,390,244.00	13	24,390,244.00	14	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	2	24,390,244.00	2	24,390,244.00	4	24,390,244.00	4	24,390,244.00	4	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00		24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	1	24,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14,390,244.00		14,390,244.00		14,390,244.00		14,390,244.00		14,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	1	14,390,244.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				2,000,000,000.00		2,250,000,000.00		2,500,000,000.00		2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan (Indeks)	65,03	70	2,000,000,000.00	73	2,250,000,000.00	76	2,500,000,000.00	80	2,500,000,000.00	80	2,500,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Indeks Ber-Akhlak (Indeks)	69,08	74,7		76,6		78,9		80,7		82,5		
4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				750,000,000.00		843,750,000.00		937,500,000.00		937,500,000.00		937,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	300,000,000.00	1	331,250,000.00	1	362,500,000.00	1	362,500,000.00	1	362,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3	3	200,000,000.00	3	231,250,000.00	3	262,500,000.00	3	262,500,000.00	3	262,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6	250,000,000.00	6	281,250,000.00	6	312,500,000.00	6	312,500,000.00	6	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				300,000,000.00		331,250,000.00		362,500,000.00		362,500,000.00		362,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	300,000,000.00	1	331,250,000.00	1	362,500,000.00	1	362,500,000.00	1	362,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				250,000,000.00		281,250,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6	250,000,000.00	6	281,250,000.00	6	312,500,000.00	6	312,500,000.00	6	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan				200,000,000.00		231,250,000.00		262,500,000.00		262,500,000.00		262,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3	3	200,000,000.00	3	231,250,000.00	3	262,500,000.00	3	262,500,000.00	3	262,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1,250,000,000.00		1,406,250,000.00		1,562,500,000.00		1,562,500,000.00		1,562,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Persentase perangkat daerah yang menyusun rencana aksi RB	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	7	7	250,000,000.00	7	281,250,000.00	7	312,500,000.00	7	312,500,000.00	7	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	3	3	250,000,000.00	3	281,250,000.00	3	312,500,000.00	3	312,500,000.00	3	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	250,000,000.00	1	281,250,000.00	1	312,500,000.00	1	312,500,000.00	1	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	30	37	250,000,000.00	39	281,250,000.00	41	312,500,000.00	41	312,500,000.00	41	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	250,000,000.00	2	281,250,000.00	2	312,500,000.00	2	312,500,000.00	2	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				250,000,000.00		281,250,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	250,000,000.00	2	281,250,000.00	2	312,500,000.00	2	312,500,000.00	2	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				250,000,000.00		281,250,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	7	7	250,000,000.00	7	281,250,000.00	7	312,500,000.00	7	312,500,000.00	7	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				250,000,000.00		281,250,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	250,000,000.00	1	281,250,000.00	1	312,500,000.00	1	312,500,000.00	1	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				250,000,000.00		281,250,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	30	37	250,000,000.00	39	281,250,000.00	41	312,500,000.00	41	312,500,000.00	41	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				250,000,000.00		281,250,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00		312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	3	3	250,000,000.00	3	281,250,000.00	3	312,500,000.00	3	312,500,000.00	3	312,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
TOTAL				**3,000,000,000.00**		**3,250,000,000.00**		**3,500,000,000.00**		**3,500,000,000.00**		**3,490,000,000.00**	

Nama Unit SKPD : Sekretariat Daerah Biro Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				86,452,608,797.00		75,732,235,533.00		78,152,321,046.00		80,635,812,095.00		83,384,144,826.00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				86,452,608,797.00		75,732,235,533.00		78,152,321,046.00		80,635,812,095.00		83,384,144,826.00	
Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah	Indeks SPBE OPD (Indeks)	3,70	3,90	36,452,608,797.00	4,00	25,732,235,533.00	4,10	28,152,321,046.00	4,20	30,635,812,095.00	4,30	33,384,144,826.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Nilai SAKIP OPD (Poin)	68,79	72		74		76		78		80		4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Indeks Pengelolaan Aset OPD (Indeks)	2,50	2,70		2,80		2,90		3,00		3,10		4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD (Persentase)	97,62	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				297,996,301.00		289,830,962.00		294,249,369.00		306,482,923.00		316,482,923.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Biro Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	13,000,000.00	2	13,100,000.00	2	13,300,000.00	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	14,000,000.00	1	4,200,000.00	1	4,800,000.00	1	5,200,000.00	1	5,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	122,996,301.00	8	123,280,962.00	8	124,399,369.00	8	127,732,923.00	8	137,732,923.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	7,000,000.00	1	7,300,000.00	1	7,900,000.00	1	8,400,000.00	1	8,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	12,000,000.00	1	12,300,000.00	1	12,900,000.00	1	13,900,000.00	1	13,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	9,000,000.00	1	9,350,000.00	1	9,850,000.00	1	10,850,000.00	1	10,850,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	120,000,000.00	8	120,300,000.00	8	121,100,000.00	8	125,100,000.00	8	125,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				122,996,301.00		123,280,962.00		124,399,369.00		127,732,923.00		137,732,923.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	122,996,301.00	8	123,280,962.00	8	124,399,369.00	8	127,732,923.00	8	137,732,923.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				9,000,000.00		9,350,000.00		9,850,000.00		10,850,000.00		10,850,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	9,000,000.00	1	9,350,000.00	1	9,850,000.00	1	10,850,000.00	1	10,850,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12,000,000.00		12,300,000.00		12,900,000.00		13,900,000.00		13,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	12,000,000.00	1	12,300,000.00	1	12,900,000.00	1	13,900,000.00	1	13,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				14,000,000.00		4,200,000.00		4,800,000.00		5,200,000.00		5,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	14,000,000.00	1	4,200,000.00	1	4,800,000.00	1	5,200,000.00	1	5,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				7,000,000.00		7,300,000.00		7,900,000.00		8,400,000.00		8,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	7,000,000.00	1	7,300,000.00	1	7,900,000.00	1	8,400,000.00	1	8,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13,000,000.00		13,100,000.00		13,300,000.00		15,300,000.00		15,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	13,000,000.00	2	13,100,000.00	2	13,300,000.00	2	15,300,000.00	2	15,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120,000,000.00		120,300,000.00		121,100,000.00		125,100,000.00		125,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	120,000,000.00	8	120,300,000.00	8	121,100,000.00	8	125,100,000.00	8	125,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24,574,058,125.00		15,324,402,876.00		17,168,696,119.00		19,179,339,786.00		21,678,672,517.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Biro Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	15,000,000.00	2	15,200,000.00	2	15,600,000.00	2	16,600,000.00	2	16,600,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2400	2400	155,000,000.00	2400	157,000,000.00	2400	159,500,000.00	2400	169,500,000.00	2400	169,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	105,000,000.00	12	106,000,000.00	12	107,500,000.00	12	114,500,000.00	12	114,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	3	40,000,000.00	3	41,300,000.00	3	41,800,000.00	3	43,900,000.00	3	43,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6	6	50,000,000.00	6	51,000,000.00	6	52,400,000.00	6	54,800,000.00	6	54,800,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3360	3360	24,184,058,125.00	3360	14,928,502,876.00	3360	16,765,896,119.00	3360	18,752,639,786.00	3360	21,251,972,517.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16	16	25,000,000.00	16	25,400,000.00	16	26,000,000.00	16	27,400,000.00	16	27,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24,184,058,125.00		14,928,502,876.00		16,765,896,119.00		18,752,639,786.00		21,251,972,517.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3360	3360	24,184,058,125.00	3360	14,928,502,876.00	3360	16,765,896,119.00	3360	18,752,639,786.00	3360	21,251,972,517.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				105,000,000.00		106,000,000.00		107,500,000.00		114,500,000.00		114,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	105,000,000.00	12	106,000,000.00	12	107,500,000.00	12	114,500,000.00	12	114,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				155,000,000.00		157,000,000.00		159,500,000.00		169,500,000.00		169,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2400	2400	155,000,000.00	2400	157,000,000.00	2400	159,500,000.00	2400	169,500,000.00	2400	169,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				40,000,000.00		41,300,000.00		41,800,000.00		43,900,000.00		43,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	3	40,000,000.00	3	41,300,000.00	3	41,800,000.00	3	43,900,000.00	3	43,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15,000,000.00		15,200,000.00		15,600,000.00		16,600,000.00		16,600,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	15,000,000.00	2	15,200,000.00	2	15,600,000.00	2	16,600,000.00	2	16,600,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				50,000,000.00		51,000,000.00		52,400,000.00		54,800,000.00		54,800,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6	6	50,000,000.00	6	51,000,000.00	6	52,400,000.00	6	54,800,000.00	6	54,800,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25,000,000.00		25,400,000.00		26,000,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16	16	25,000,000.00	16	25,400,000.00	16	26,000,000.00	16	27,400,000.00	16	27,400,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				516,230,160.00		524,105,265.00		534,260,019.00		567,697,507.00		567,697,507.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	5	90,000,000.00	5	91,000,000.00	5	92,300,000.00	5	96,300,000.00	5	96,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	51,230,160.00	12	51,705,265.00	12	52,506,019.00	12	54,843,507.00	12	54,843,507.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	30,000,000.00	1	30,500,000.00	1	31,200,000.00	1	32,300,000.00	1	32,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	75,000,000.00	1	76,000,000.00	1	77,000,000.00	1	82,000,000.00	1	82,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	72	30,000,000.00	72	30,400,000.00	72	31,200,000.00	72	32,200,000.00	72	32,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	40,000,000.00	1	40,500,000.00	1	41,300,000.00	1	42,300,000.00	1	42,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	200,000,000.00	1	204,000,000.00	1	208,754,000.00	1	227,754,000.00	1	227,754,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				90,000,000.00		91,000,000.00		92,300,000.00		96,300,000.00		96,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	5	90,000,000.00	5	91,000,000.00	5	92,300,000.00	5	96,300,000.00	5	96,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200,000,000.00		204,000,000.00		208,754,000.00		227,754,000.00		227,754,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	200,000,000.00	1	204,000,000.00	1	208,754,000.00	1	227,754,000.00	1	227,754,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				30,000,000.00		30,500,000.00		31,200,000.00		32,300,000.00		32,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	30,000,000.00	1	30,500,000.00	1	31,200,000.00	1	32,300,000.00	1	32,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				51,230,160.00		51,705,265.00		52,506,019.00		54,843,507.00		54,843,507.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	51,230,160.00	12	51,705,265.00	12	52,506,019.00	12	54,843,507.00	12	54,843,507.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30,000,000.00		30,400,000.00		31,200,000.00		32,200,000.00		32,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	72	30,000,000.00	72	30,400,000.00	72	31,200,000.00	72	32,200,000.00	72	32,200,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75,000,000.00		76,000,000.00		77,000,000.00		82,000,000.00		82,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	75,000,000.00	1	76,000,000.00	1	77,000,000.00	1	82,000,000.00	1	82,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				40,000,000.00		40,500,000.00		41,300,000.00		42,300,000.00		42,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	40,000,000.00	1	40,500,000.00	1	41,300,000.00	1	42,300,000.00	1	42,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				150,000,000.00		152,000,000.00		154,000,000.00		161,000,000.00		161,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Meningkatnya Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	2	60,000,000.00	2	60,800,000.00	2	61,800,000.00	2	64,300,000.00	2	64,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	1	30,000,000.00	1	30,400,000.00	1	30,600,000.00	1	32,100,000.00	1	32,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	40,000,000.00	1	40,500,000.00	1	41,100,000.00	1	43,100,000.00	1	43,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	2	20,000,000.00	2	20,300,000.00	2	20,500,000.00	2	21,500,000.00	2	21,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				40,000,000.00		40,500,000.00		41,100,000.00		43,100,000.00		43,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	40,000,000.00	1	40,500,000.00	1	41,100,000.00	1	43,100,000.00	1	43,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				60,000,000.00		60,800,000.00		61,800,000.00		64,300,000.00		64,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	2	60,000,000.00	2	60,800,000.00	2	61,800,000.00	2	64,300,000.00	2	64,300,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				30,000,000.00		30,400,000.00		30,600,000.00		32,100,000.00		32,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	1	30,000,000.00	1	30,400,000.00	1	30,600,000.00	1	32,100,000.00	1	32,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				20,000,000.00		20,300,000.00		20,500,000.00		21,500,000.00		21,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	2	20,000,000.00	2	20,300,000.00	2	20,500,000.00	2	21,500,000.00	2	21,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,049,995,067.00		800,107,950.00		752,632,492.00		826,677,231.00		873,677,231.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Lingkup Biro Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	10	85,000,000.00	10	88,000,000.00	10	92,000,000.00	10	102,000,000.00	10	102,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	27	1	150,000,000.00	1	104,000,000.00	1	114,000,000.00	1	124,000,000.00	1	134,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	75	7	125,000,000.00	7	117,000,000.00	7	113,060,000.00	7	123,060,000.00	7	133,060,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	10	185,000,000.00	10	117,000,000.00	10	113,000,000.00	10	123,000,000.00	10	130,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	40	290,000,000.00	50	235,000,000.00	50	200,000,000.00	50	226,000,000.00	50	236,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	7	214,995,067.00	7	139,107,950.00	8	120,572,492.00	8	128,617,231.00	8	138,617,231.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				214,995,067.00		139,107,950.00		120,572,492.00		128,617,231.00		138,617,231.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	7	214,995,067.00	7	139,107,950.00	8	120,572,492.00	8	128,617,231.00	8	138,617,231.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				185,000,000.00		117,000,000.00		113,000,000.00		123,000,000.00		130,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	10	185,000,000.00	10	117,000,000.00	10	113,000,000.00	10	123,000,000.00	10	130,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				150,000,000.00		104,000,000.00		114,000,000.00		124,000,000.00		134,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	27	1	150,000,000.00	1	104,000,000.00	1	114,000,000.00	1	124,000,000.00	1	134,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai				125,000,000.00		117,000,000.00		113,060,000.00		123,060,000.00		133,060,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	75	7	125,000,000.00	7	117,000,000.00	7	113,060,000.00	7	123,060,000.00	7	133,060,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				85,000,000.00		88,000,000.00		92,000,000.00		102,000,000.00		102,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	10	85,000,000.00	10	88,000,000.00	10	92,000,000.00	10	102,000,000.00	10	102,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				290,000,000.00		235,000,000.00		200,000,000.00		226,000,000.00		236,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	40	290,000,000.00	50	235,000,000.00	50	200,000,000.00	50	226,000,000.00	50	236,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3,914,721,427.00		3,110,790,153.00		3,361,826,315.00		3,482,715,482.00		3,624,715,482.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	6	280,000,000.00	7	290,000,000.00	7	300,000,000.00	7	310,000,000.00	7	310,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	1,064,721,427.00	12	1,087,790,153.00	12	1,140,826,315.00	12	1,183,715,482.00	12	1,183,715,482.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	250,000,000.00	12	220,000,000.00	12	290,000,000.00	12	300,000,000.00	12	310,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	900,000,000.00	12	510,000,000.00	12	620,000,000.00	12	630,000,000.00	12	730,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	35,000,000.00	1	30,000,000.00	1	33,000,000.00	1	39,000,000.00	1	40,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	40,000,000.00	1	38,000,000.00	1	33,000,000.00	1	39,000,000.00	1	40,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	155,000,000.00	4	158,000,000.00	4	162,000,000.00	4	168,000,000.00	4	168,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	270,000,000.00	4	237,000,000.00	4	223,000,000.00	4	233,000,000.00	4	253,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	4	920,000,000.00	4	540,000,000.00	4	560,000,000.00	4	580,000,000.00	4	590,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				920,000,000.00		540,000,000.00		560,000,000.00		580,000,000.00		590,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	4	920,000,000.00	4	540,000,000.00	4	560,000,000.00	4	580,000,000.00	4	590,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				270,000,000.00		237,000,000.00		223,000,000.00		233,000,000.00		253,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	270,000,000.00	4	237,000,000.00	4	223,000,000.00	4	233,000,000.00	4	253,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				155,000,000.00		158,000,000.00		162,000,000.00		168,000,000.00		168,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	155,000,000.00	4	158,000,000.00	4	162,000,000.00	4	168,000,000.00	4	168,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1,064,721,427.00		1,087,790,153.00		1,140,826,315.00		1,183,715,482.00		1,183,715,482.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	1,064,721,427.00	12	1,087,790,153.00	12	1,140,826,315.00	12	1,183,715,482.00	12	1,183,715,482.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				280,000,000.00		290,000,000.00		300,000,000.00		310,000,000.00		310,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	6	280,000,000.00	7	290,000,000.00	7	300,000,000.00	7	310,000,000.00	7	310,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				900,000,000.00		510,000,000.00		620,000,000.00		630,000,000.00		730,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	900,000,000.00	12	510,000,000.00	12	620,000,000.00	12	630,000,000.00	12	730,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250,000,000.00		220,000,000.00		290,000,000.00		300,000,000.00		310,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	250,000,000.00	12	220,000,000.00	12	290,000,000.00	12	300,000,000.00	12	310,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35,000,000.00		30,000,000.00		33,000,000.00		39,000,000.00		40,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	35,000,000.00	1	30,000,000.00	1	33,000,000.00	1	39,000,000.00	1	40,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40,000,000.00		38,000,000.00		33,000,000.00		39,000,000.00		40,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	40,000,000.00	1	38,000,000.00	1	33,000,000.00	1	39,000,000.00	1	40,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,080,000,000.00		922,753,155.00		1,053,000,000.00		1,037,000,000.00		1,057,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	240	225	240,000,000.00	235	177,453,155.00	250	201,400,000.00	300	263,900,000.00	300	273,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	100,000,000.00	4	102,000,000.00	5	104,000,000.00	5	112,000,000.00	5	112,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	9	3	700,000,000.00	4	603,000,000.00	5	707,000,000.00	6	619,000,000.00	6	629,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	5	40,000,000.00	6	40,300,000.00	7	40,600,000.00	8	42,100,000.00	8	42,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700,000,000.00		603,000,000.00		707,000,000.00		619,000,000.00		629,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	9	3	700,000,000.00	4	603,000,000.00	5	707,000,000.00	6	619,000,000.00	6	629,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				40,000,000.00		40,300,000.00		40,600,000.00		42,100,000.00		42,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	5	40,000,000.00	6	40,300,000.00	7	40,600,000.00	8	42,100,000.00	8	42,100,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100,000,000.00		102,000,000.00		104,000,000.00		112,000,000.00		112,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	100,000,000.00	4	102,000,000.00	5	104,000,000.00	5	112,000,000.00	5	112,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				240,000,000.00		177,453,155.00		201,400,000.00		263,900,000.00		273,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	240	225	240,000,000.00	235	177,453,155.00	250	201,400,000.00	300	263,900,000.00	300	273,900,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,928,244,054.00		3,075,965,500.00		3,237,501,137.00		3,440,125,135.00		3,440,125,135.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Lingkup Biro Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	300,000,000.00	12	310,000,000.00	12	320,500,000.00	12	370,500,000.00	12	370,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1,128,244,054.00	1	1,145,965,500.00	1	1,172,001,137.00	1	1,264,625,135.00	1	1,264,625,135.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1,500,000,000.00	12	1,620,000,000.00	12	1,745,000,000.00	12	1,805,000,000.00	12	1,805,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300,000,000.00		310,000,000.00		320,500,000.00		370,500,000.00		370,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	300,000,000.00	12	310,000,000.00	12	320,500,000.00	12	370,500,000.00	12	370,500,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,500,000,000.00		1,620,000,000.00		1,745,000,000.00		1,805,000,000.00		1,805,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1,500,000,000.00	12	1,620,000,000.00	12	1,745,000,000.00	12	1,805,000,000.00	12	1,805,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,128,244,054.00		1,145,965,500.00		1,172,001,137.00		1,264,625,135.00		1,264,625,135.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1,128,244,054.00	1	1,145,965,500.00	1	1,172,001,137.00	1	1,264,625,135.00	1	1,264,625,135.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,941,363,663.00		1,532,279,672.00		1,596,155,595.00		1,634,774,031.00		1,664,774,031.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	341,363,663.00	12	220,279,672.00	12	230,155,595.00	12	278,774,031.00	12	288,774,031.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	600,000,000.00	20	504,000,000.00	20	508,000,000.00	20	512,000,000.00	20	522,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	450	450	100,000,000.00	450	102,000,000.00	450	146,000,000.00	450	116,000,000.00	450	116,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120	120	900,000,000.00	120	706,000,000.00	120	712,000,000.00	120	728,000,000.00	120	738,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600,000,000.00		504,000,000.00		508,000,000.00		512,000,000.00		522,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	600,000,000.00	20	504,000,000.00	20	508,000,000.00	20	512,000,000.00	20	522,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				900,000,000.00		706,000,000.00		712,000,000.00		728,000,000.00		738,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120	120	900,000,000.00	120	706,000,000.00	120	712,000,000.00	120	728,000,000.00	120	738,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100,000,000.00		102,000,000.00		146,000,000.00		116,000,000.00		116,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	450	450	100,000,000.00	450	102,000,000.00	450	146,000,000.00	450	116,000,000.00	450	116,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				341,363,663.00		220,279,672.00		230,155,595.00		278,774,031.00		288,774,031.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	341,363,663.00	12	220,279,672.00	12	230,155,595.00	12	278,774,031.00	12	288,774,031.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Meningkatnya Dukungan Pelayanan Pimpinan	Tingkat Kepuasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah terhadap Pelayanan Biro Umum (%)	100	100	50,000,000,000.00	100	50,000,000,000.00	100	50,000,000,000.00	100	50,000,000,000.00	100	50,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,800,000,000.00		1,800,000,000.00		1,800,000,000.00		1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Maningkatnya Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8	8	200,000,000.00	8	200,000,000.00	8	200,000,000.00	8	200,000,000.00	8	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24	24	350,000,000.00	24	350,000,000.00	24	350,000,000.00	24	350,000,000.00	24	350,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	24	24	1,250,000,000.00	24	1,250,000,000.00	24	1,250,000,000.00	24	1,250,000,000.00	24	1,250,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				350,000,000.00		350,000,000.00		350,000,000.00		350,000,000.00		350,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24	24	350,000,000.00	24	350,000,000.00	24	350,000,000.00	24	350,000,000.00	24	350,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8	8	200,000,000.00	8	200,000,000.00	8	200,000,000.00	8	200,000,000.00	8	200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,250,000,000.00		1,250,000,000.00		1,250,000,000.00		1,250,000,000.00		1,250,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	24	24	1,250,000,000.00	24	1,250,000,000.00	24	1,250,000,000.00	24	1,250,000,000.00	24	1,250,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				25,986,449,328.00		26,986,449,328.00		26,086,449,328.00		26,386,449,328.00		26,686,449,328.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terselenggaranya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	6	8,700,000,000.00	6	9,200,000,000.00	6	8,700,000,000.00	6	8,800,000,000.00	6	8,900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	10	10	10,100,000,000.00	10	10,400,000,000.00	10	10,200,000,000.00	10	10,300,000,000.00	10	10,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	6	7,186,449,328.00	6	7,386,449,328.00	6	7,186,449,328.00	6	7,286,449,328.00	6	7,386,449,328.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				8,700,000,000.00		9,200,000,000.00		8,700,000,000.00		8,800,000,000.00		8,900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	6	8,700,000,000.00	6	9,200,000,000.00	6	8,700,000,000.00	6	8,800,000,000.00	6	8,900,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				7,186,449,328.00		7,386,449,328.00		7,186,449,328.00		7,286,449,328.00		7,386,449,328.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	6	7,186,449,328.00	6	7,386,449,328.00	6	7,186,449,328.00	6	7,286,449,328.00	6	7,386,449,328.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				10,100,000,000.00		10,400,000,000.00		10,200,000,000.00		10,300,000,000.00		10,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	10	10	10,100,000,000.00	10	10,400,000,000.00	10	10,200,000,000.00	10	10,300,000,000.00	10	10,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				14,913,550,672.00		13,913,550,672.00		14,713,550,672.00		15,013,550,672.00		14,913,550,672.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terselenggaranya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	12	12	380,000,000.00	12	380,000,000.00	12	380,000,000.00	12	380,000,000.00	12	380,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	12	12	1,400,000,000.00	12	1,400,000,000.00	12	1,100,000,000.00	12	1,400,000,000.00	12	1,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	750	750	13,133,550,672.00	780	12,133,550,672.00	800	13,233,550,672.00	840	13,233,550,672.00	840	13,133,550,672.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan				380,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	12	12	380,000,000.00	12	380,000,000.00	12	380,000,000.00	12	380,000,000.00	12	380,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				13,133,550,672.00		12,133,550,672.00		13,233,550,672.00		13,233,550,672.00		13,133,550,672.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	750	750	13,133,550,672.00	780	12,133,550,672.00	800	13,233,550,672.00	840	13,233,550,672.00	840	13,133,550,672.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1,400,000,000.00		1,400,000,000.00		1,100,000,000.00		1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	12	12	1,400,000,000.00	12	1,400,000,000.00	12	1,100,000,000.00	12	1,400,000,000.00	12	1,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan				7,300,000,000.00		7,300,000,000.00		7,400,000,000.00		6,800,000,000.00		6,600,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Meningkatnya capaian Kinerja Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	12	12	3,400,000,000.00	12	3,400,000,000.00	12	3,700,000,000.00	12	3,200,000,000.00	12	3,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	12	12	1,700,000,000.00	12	1,700,000,000.00	12	1,700,000,000.00	12	1,500,000,000.00	12	1,200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	750	750	2,200,000,000.00	750	2,200,000,000.00	750	2,000,000,000.00	750	2,100,000,000.00	750	2,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.14.0001 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1,700,000,000.00		1,700,000,000.00		1,700,000,000.00		1,500,000,000.00		1,200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	12	12	1,700,000,000.00	12	1,700,000,000.00	12	1,700,000,000.00	12	1,500,000,000.00	12	1,200,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3,400,000,000.00		3,400,000,000.00		3,700,000,000.00		3,200,000,000.00		3,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	12	12	3,400,000,000.00	12	3,400,000,000.00	12	3,700,000,000.00	12	3,200,000,000.00	12	3,400,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				2,200,000,000.00		2,200,000,000.00		2,000,000,000.00		2,100,000,000.00		2,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	750	750	2,200,000,000.00	750	2,200,000,000.00	750	2,000,000,000.00	750	2,100,000,000.00	750	2,000,000,000.00	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum
TOTAL				**86,452,608,797.00**		**75,732,235,533.00**		**78,152,321,046.00**		**80,635,812,095.00**		**83,384,144,826.00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

REKAPITULASI PENDANAAN RENSTRA SETDA 2025-2029

4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				107,452,608,797.00		112,482,235,533.00		119,152,321,046.00		126,135,812,095.00		129,874,144,826.00	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0001 - Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				6,000,000,000.00		16,000,000,000.00		18,000,000,000.00		20,000,000,000.00		20,000,000,000.00	BIRO PEMKESRA
4.01.0.00.0.00.01.0002 - Sekretariat Daerah Biro Hukum				3,000,000,000.00		4,000,000,000.00		5,000,000,000.00		6,000,000,000.00		7,000,000,000.00	BIRO HUKUM
4.01.0.00.0.00.01.0003 - Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan				6,000,000,000.00		10,000,000,000.00		11,000,000,000.00		12,000,000,000.00		12,000,000,000.00	BIRO EKBANG
4.01.0.00.0.00.01.0004 - Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa				3,000,000,000.00		3,500,000,000.00		3,500,000,000.00		4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	BIRO BARJAS
4.01.0.00.0.00.01.0005 - Sekretariat Daerah Biro Organisasi				3,000,000,000.00		3,250,000,000.00		3,500,000,000.00		3,500,000,000.00		3,490,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4.01.0.00.0.00.01.0006 - Sekretariat Daerah Biro Umum				86,452,608,797.00		75,732,235,533.00		78,152,321,046.00		80,635,812,095.00		83,384,144,826.00	BIRO UMUM
TOTAL				**107,452,608,797.00**		**112,482,235,533.00**		**119,152,321,046.00**		**126,135,812,095.00**		**129,874,144,826.00**	

Plh. Sekretaris Daerah,
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. Herdin Ismail, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP: 197007011991011004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).